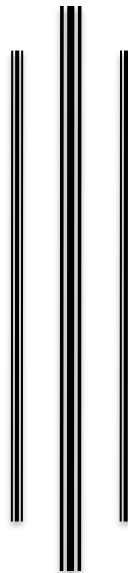




# **RENCANA KERJA**

## **KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

### **TAHUN ANGGARAN 2023**





KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor: Kep/ 1096 /VI/2022

tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

8. Surat .....

8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2023;
  2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
  3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/819/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023;
  4. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia Nomor: KEP/1504/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2020-2024;
  5. Perkiraan Keadaan Intelijen Kepolisian Daerah Jawa Tengah T.A. 2023;
  6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagai Pedoman pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian dan sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja di jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang  
pada tanggal : 29 Juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A2, B, dan C Polda Jateng

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Asrena Kapolri.
5. Karo Jakstra Srena Polri.
6. Wakapolda Jateng.

## DAFTAR ISI

	Halaman
I. LATAR BELAKANG .....	1
1. Kondisi Umum .....	1
2. Identifikasi Masalah .....	34
II. TUJUAN DAN SASARAN .....	39
1. Visi dan Misi .....	39
2. Tujuan Jangka Menengah .....	39
3. Sasaran Prioritas .....	40
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	41
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2023 .....	41
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng Tahun 2023 .....	70
3. Program Prioritas Kapolri, Pembangunan Zona Integritas dan <i>Commander Wish</i> Kapolda Jateng .....	98
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF POLDA JATENG T.A. 2023 .....	99
1. Program dan Kegiatan Polda Jateng .....	99
2. Pagu Indikatif Polda Jateng T.A. 2023 .....	102
V. PENUTUP .....	105

### LAMPIRAN

- I. Lampiran 1: Rencana Kerja Tahunan Polda Jateng TA 2023
- II. Lampiran 2: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) format versi Bappenas TA 2023

**RENCANA KERJA  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh komponen masyarakat lainnya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Polri menjabarkan RPJP Nasional dengan menyusun Grand Strategy Polri (2005-2025) yang terbagi menjadi empat tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I (periode 2005-2010) membangun kepercayaan (*Trust building*);
- b. Tahap II (periode 2011-2015) membangun kemitraan (*Partnership building*);

c. Tahap III .....

c. Tahap III (periode 2016-2020) menuju organisasi yang unggul (*Strive for Excellence*);

d. Tahap IV (periode 2021-2025) organisasi yang unggul (*Excellent*).

dengan berpedoman pada *Grand Strategy* Polri (2005-2025) perwujudannya sebagaimana empat tahap yang telah dicanangkan, pada tahap *Trust Building* masyarakat cenderung lebih mendambakan rasa aman dan rasa keadilan, tahap *Partnership building* merupakan tahap mengikutsertakan masyarakat untuk berperan dalam meningkatkan kepuasan terhadap rasa aman dan keadilan, pada tahap ketiga *Strive for Excellence* masyarakat lebih mengharapkan pada dimensi kualitas pelayanan yang prima, efektif dan efisien ditengah era globalisasi yang semakin canggih, pada tahap ke empat yaitu *Excellent*, Polri diharap sudah menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku pada organisasi kepolisian berkelas Dunia.

Kepemimpinan Polri saat ini memiliki nilai strategis karena terjadi pada saat Polri memulai tahap *Excellent* yaitu organisasi kepolisian yang unggul. Kondisi ini menuntut agar kita berpikir atau memiliki mental seperti *extraordinary people* atau manusia yang luar biasa, yang tidak hanya bisa bermimpi dan berharap, tetapi juga mampu membuat tujuan dan rencana yang baik, dan sanggup menjalankan apa yang sudah direncanakan dengan penuh tanggung jawab.

Alasan yang paling mempengaruhi adalah sikap dan mental orang-orangnya yang tidak siap menjadi sukses, disinilah pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Hal ini sejalan dengan Visi Presiden RI yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam mewujudkan visi tersebut, Presiden RI mempunyai 9 misi dalam pemerintahannya, yaitu:

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

h. pengelolaan .....

- h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden RI memfokuskan kepada 7 agenda pembangunan, sebagai berikut:

- a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan dalam mendukung terlaksananya seluruh agenda pembangunan nasional khususnya pada agenda ketujuh yaitu “Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”.

Polri membangun kepemimpinan 2021-2024 dengan *tagline* transformasi **POLRI PRESISI** yang merupakan abreviasi dari **PRE**diktif, respon**SI**abilitas dan transparan**SI** berkeadilan. Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari POLRI PROMOTER (PROfesional, MOdern, dan TERpercaya) yang telah digunakan pada periode sebelumnya, dengan pendekatan pemolisian berorientasi pemecahan masalah (*problem solving oriented policing*). Dalam kepemimpinan POLRI PRESISI, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan.

Adanya .....



Adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah:

- a. Polri yang semakin profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian yang “Presisi”;
- b. menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah- tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;
- c. menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana;
- d. meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensigangguan Kamtibmas.

Untuk menjawab tantangan harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri maka Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyusun pola strategi dengan **Transformasi Menuju Polri Yang Presisi** melalui **16 Program Prioritas Kapolri**, yang terdiri dari:

- a. penataan kelembagaan;
- b. perubahan sistem dan metode Organisasi;
- c. menjadikan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*;
- d. perubahan teknologi Kepolisian *Modern Police 4.0*;
- e. pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas;
- f. peningkatan kinerja penegakkan hukum;
- g. pemantapan dukungan Polri dalam penanganan *Covid-19*;
- h. pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- i. menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional;
- j. penguatan penanganan konflik social;
- k. peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
- l. mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi;
- m. pemantapan komunikasi publik;
- n. pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;

o. Penguatan .....

- o. penguatan fungsi pengawasan;
- p. pengawasan oleh masyarakat (*Public Complaint*).

Tahun 2023 merupakan tahun keempat tahapan Rencana Strategis Polri tahun 2020-2024, Renstra ini merupakan tahap akhir dari *Grand Strategi* Polri 2005-2025 yaitu tahap ke IV *Excellent*, Renstra sebelumnya menekankan pada pemantapan kelembagaan dan pelayanan Polri kearah profesional, modern dan terpercaya. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan Polri sesuai visi dan misi yang ditetapkan dalam Renstra tersebut, meskipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan, sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra Polri 2020-2024 menekankan pada peran Polri yaitu sebagai fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal diatas maka Renstra Polri dirancang dengan melihat kondisi umum Polri, yaitu capaian kinerja dari Renstra sebelumnya, tugas dan fungsi Polri, kondisi keamanan dan peran institusi Polri.

Pada perkembangannya Polri telah berupaya untuk senantiasa berbenah, salah satunya dengan membuat standar untuk meningkatkan kinerja lembaga dan pejabat Polri yaitu tercetusnya konsep Indeks Tata Kelola yang merupakan instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Kepolisian yang baik, yang bersifat objektif, komprehensif sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan, sebagai tolok ukur kemajuan yang dicapai dan alat untuk memperbandingkan secara objektif, *fair* dan akurat. ITK mencoba mengukur sejauh mana reformasi kultural di tubuh Polri telah bergulir, sehingga perubahan-perubahan yang telah terjadi dapat dilihat secara jelas berdasarkan fakta data serta persepsi publik pengguna jasa Polri.

Untuk mewujudkan Program Prioritas Kapolri, Polda Jawa Tengah menjabarkan kedalam konsep yang dituangkan kedalam kebijakan dan strategi Kapolda Jawa Tengah "Polda Jateng Hadir" yaitu Polda Jateng siap hadir di tengah masyarakat untuk wujudkan Jawa Tengah yang aman dan tentram.

Rencana kerja pemerintah RI tahun 2023 mengusung tema "peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dengan 8 arah kebijakan:

- a. percepatan .....

- a. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
- b. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
- c. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
- d. mendorong pemulihan dunia usaha;
- e. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- f. pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- g. percepatan pembangunan infrastruktur dasar;
- h. pembangunan ibukota nusantara.

Melandasi tema rencana kerja pemerintah tahun 2023 maka Polri dalam rencana kerja T.A. 2023 mengusung tema “Polri yang Presisi mendukung peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” menjabarkan kedalam 6 sasaran prioritas Polri, yaitu:

- a. memantapkan kinerja harkamtibmas guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
- b. mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri;
- c. penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- d. meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
- e. pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polri yang modern;
- f. penguatan pengawasan yang efektif berbasis T.I guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa, dan berada di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Luas Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04 persen dari luas Pulau Jawa atau 1,70 persen dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Panjang garis pantai Jawa Tengah sebesar 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Provinsi Jawa Tengah berada di dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta-Surabaya), dan pusat pariwisata DIY. Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara. Secara administratif, pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah .....

Tengah terdiri dari 35 Kabupaten dan Kota yang terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota, meliputi 576 Kecamatan, 7.809 Desa dan 753 Kelurahan.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara topografi sekitar 53% berada pada ketinggian 0-99 m dpl, dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%, lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%, lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah.

Dari aspek klimatologi, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah Tahun 2021 berkisar 23,4<sup>0</sup>C sampai dengan 33,6<sup>0</sup>C. Kelembaban udara rata-rata relatif bervariasi berkisar 56,7 persen sampai dengan 96,1 persen. Tahun 2021 tercatat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 694 mm<sup>3</sup> dan curah hujan terendah di bulan Juli sebesar 15 mm<sup>3</sup>. Hari hujan terbanyak juga terjadi di bulan Februari sebanyak 27 hari hujan, dan terendah adalah di bulan Maret dan Juli sebanyak 7 hari hujan.

Berdasarkan proyeksi penduduk BPS bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak 36.742.501 jiwa, terus mengalami peningkatan dalam jangka waktu tahun 2010 hingga 2020 sekitar 4,1 juta jiwa atau rata-rata 400 ribu setiap tahun. Jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah menurut hasil Sensus Penduduk sebanyak 18.472.627 jiwa, atau 50,28% sedangkan jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah menurut hasil Sensus Penduduk sebanyak 18.269.874 jiwa, atau 49,72% dari penduduk Jawa Tengah. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah sebesar 101,11. Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur maupun Kabupaten/Kota.

Sebaran Penduduk Jawa Tengah Tahun 2021 menurut Kabupaten/Kota bervariasi. Kabupaten/Kota dengan penduduk terbesar mencakup Kabupaten Brebes 1,99 juta jiwa, Cilacap 1,96 juta jiwa, Banyumas 1,78 juta jiwa dan Kota Semarang 1,65 juta jiwa. Keempat Kabupaten/Kota ini menyumbang sekitar seperlima penduduk di Jawa Tengah. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk terkecil meliputi Kota Magelang 121 ribu jiwa, Kota Salatiga 193 ribu jiwa, Kota Tegal 275

ribu .....

ribu jiwa, Kota Pekalongan 308 ribu jiwa dan Kota Surakarta 522 ribu jiwa. Kelima Kota tersebut hanya memiliki andil sekitar 4 % dari total penduduk di Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat-istiadat, tradisi, dan kesenian. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (96,0 persen), selebihnya beragama Kristen (2,6 persen), dan lainnya (1,4 persen). Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa 98 %, Sunda 1 %, lain-lain 1 %. Sedangkan agama yang dianut masyarakat Jawa Tengah Islam 96,7 %, Katholik 2,2 %, Protestan 1,7 %, Budha 0,64 %, Hindu 0,08 % dan lain-lain 0,33 %.

Dengan adanya perkembangan Wilayah administrasi di wilayah hukum Polda Jateng masih terdapat 13 Kecamatan yang belum ada Polsek/Polsubsektornya yaitu Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Kecamatan Wonokerto dan kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Selopampang, kecamatan Bansari, Kecamatan Tlogomulyo dan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Ngampel dan Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Kecamatan Kertanagara dan Kecamatan Karang Jambu Kabupaten Purbalingga.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan Rencana Kerja Polda Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Perkembangan dan perubahan yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam) disamping kondisi internal dan eksternal Polri yang akan dianalisis dengan pendekatan SWOT, dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Perkembangan Aspek Kehidupan di wilayah Provinsi Jawa Tengah

1) Bidang Ideologi

- a) masih potensialnya kegiatan kelompok masyarakat untuk merubah pola pikir dengan menanamkan paham komunisme, radikalisme sebagai tindakan pembenaran dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

b) adanya .....

- b) adanya upaya menghilangkan atau menjauhkan generasi bangsa dari jati dirinya, kultur, dasar negara Pancasila sebagai wawasan bermasyarakat dikaburkan oleh informasi global sehingga munculnya intoleransi, anarkhisme serta radikalisme;
  - c) faham ISIS masih menjadi ancaman penyebaran dan berkembang dalam penduduk negara Islam termasuk di Jawa Tengah akan berpotensi berkembangnya budaya aksi teror dan kekerasan;
  - d) masih potensialnya kegiatan kelompok radikal untuk melakukan kegiatan dalam rangka menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.
- 2) Politik
- a) menguatnya aksi tuntutan terhadap demokratisasi, penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM dan lingkungan hidup serta mengkritisi kinerja Kabinet Pemerintahan saat ini sehingga berpotensi memunculkan isu negatif tentang Pemerintahan;
  - b) masih potensialnya konflik kepentingan dalam perpolitikan, konflik antar kelembagaan, parpol maupun politisi yang kurang harmonis sehingga memicu dinamika politik yang tidak sehat;
  - c) pemanfaatan media masa dan media sosial akan semakin meningkat dan lebih efektif dalam menyampaikan propaganda politik untuk persiapan Pilkada 2022 dan 2023 dan Pemilu legislatif Tahun 2024, yang berpotensi terjadinya hujatan, kritik, kebencian serta sara yang dimungkinkan memprovokasi masyarakat sehingga berpotensi terjadinya konflik sosial;
- 3) Ekonomi
- a) Permasalahan di bidang ekonomi masih cukup kompleks di wilayah Jawa Tengah dengan berbagai permasalahan (perbankan,pinjol, kenaikan bahan pokok,permasalahan proyek PSN, BBM, pupuk bersubsidi, unra nelayan/ petani,pertambangan galian C) yang terjadi dan dapat berpengaruh terhadap situasi Kamtibmas di wilayah Jawa Tengah;

b) kondisi .....

- b) kondisi perekonomian di Jawa Tengah pada tahun 2021 pertumbuhannya menurun karena terdampaknya Covid-19, ditahun 2022 dengan telah divaksinnya semua penduduk Jawa Tegah dimungkinkan di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami positif atau peningkatan walaupun dimungkinkan belum tumbuh normal di semua sektor;
  - c) berbagai permasalahan dan kebijakan ekonomi Pemerintah tahun 2021 sebagian anggaran negara difokuskan untuk penanganan wabah Covid-19 sehingga terjadinya devisa, kemudian pemerintah menerapkan pemotongan anggaran terhadap lembaga pemerintahan, namun di tahun 2022 pemerintah optimis dengan langkah kebijakan UU Omnibus Law yang akan meningkatnya investor asing masuk Indonesia sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2023;
  - d) persaingan ekonomi akan menjadi tidak sehat dengan adanya pengusaha dalam politik dimungkinkan akan memanfaatkan pengaruh kekuasaan untuk ketahanan dalam kelangsungan asset asetnya;
  - e) kondisi perekonomian meningkat di tahun 2023 sehingga akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang mengalami peningkatan bisa kembali ke level sebelum pandemic;
  - f) adaptasi kebiasaan baru (AKB) merupakan tindakan menerapkan tatanan baru guna menjaga produktifitas selama pandemic, yang menjadi kunci dalam perkembangan ekonomi digital pada tahun 2022-2023.
- 4) Sosial Budaya
- a) konflik horizontal dan vertical beberapa daerah di Jawa Tengah yang dilatar belakang masalah SARA, pertanahan, perkebunan, pertambangan, pendirian pabrik, pembangunan gedung dll masih akan mewarnai situasi kemanan Jawa Tengah pada tahun 2023;
  - b) perubahan .....

- b) perubahan iklim global dan kondisi geografis Jawa Tengah diperkirakan akan berdampak pada terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan, letusan vulkanik gunung berapi masih akan menjadi ancaman yang dapat mempengaruhi situasi kamtibmas di tahun 2023;
  - c) aksi unjuk rasa menentang terhadap kebijaksanaan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah karena kurangnya pemerintah melibatkan aspirasi publik dimungkinkan masih bergulir di tahun mendatang, hal ini akan mempengaruhi kondusifitas Kamtibmas.
- 5) Keamanan
- a) potensi kerawanan penyebaran paham terorisme dan radikalisme baik yang secara langsung maupun propaganda melalui medsos ataupun media lainnya yang berdampak timbulnya kekerasan dan aksi terror di masyarakat yang sangat mengganggu kondusifitas kamtibmas.
  - b) meningkatnya kejahatan konvensional maupun kejahatan konflik sosial yang berimplikasi kontijensi karena meningkatnya pengangguran akibat dampak krisis ekonomi karena Pandemi Covid -19 di tahun 2022, serta permasalahan pelanggaran interen anggota Polri.
  - c) dengan telah dibubarkannya beberapa ormas Islam (FPI, HTI) karena legalitasnya dan mendukung Khilafah Islamiah, hal ini akan berpotensi timbulnya ormas Islam yang baru yang lebih besar yang kemungkinan akan melawan pemerintah sehingga berpotensi terjadinya perpecahan kesatuan bangsa;
  - d) masih berpeluangnya bagi kelompok jaringan terorisme, radikalisme dan separatisme untuk melakukan aksinya yang sangat mengganggu Kamtibmas mendatang;
  - e) Serangan siber yang akan berdampak meningkatnya ancaman pencurian data, perusakan sistem teknologi informasi, berbagai bentuk aksi ilegal dibidang keuangan dan lainnya.

b. Analisa .....



b. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polda Jateng dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya, dapat dianalisis dari faktor-faktor internal maupun eksternal melalui analisis SWOT yaitu :

1) Kekuatan (*Strength*)

- a) postur kekuatan Polda Jateng dengan Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai ujung tombak pelayanan Kamtibmas prima kepada masyarakat secara bertahap ditambah kekuatan termasuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui pelatihan fungsi dan pendidikan kejuruan secara berkesinambungan diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan yang tergelar mulai dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek dan Polsubsektor dengan struktur 1 Polda, 1 Polrestabes, 2 Polresta, 32 Polres, 553 Polsek dan 17 Polsubsektor;
- b) berdasarkan data kekuatan personel Polda Jateng dari Biro SDM Polda Jateng per Juni 2022, Pegawai Negeri pada Polri di Polda Jateng sebanyak 34.532 orang terdiri dari anggota Polri 32.855 yang meliputi 2 orang Pati, 719 orang Pamen, 3.503 orang Pama, 28.403 orang Brigadir, 228 orang Tamtama dan PNS Polri 1.677 orang (sumber : Bag Binkar Ro SDM Polda Jateng);
- c) seluruh jajaran Polda Jateng sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya, meliputi:
  - (1) Bangunan Kantor:
 

(a) Polda	:	32 unit;
(b) SPN	:	6 unit;
(c) Polres/Ta/Tabes	:	210 unit;
(d) Polsek	:	639 unit;
(e) Polsubsektor	:	3 unit;
(f) Satbrimob	:	1 unit;
(g) Kompi/Detasemen Brimmob	:	7 unit;
		(h) Ditpolairud .....

- |     |   |   |                 |
|-----|---|---|-----------------|
| (h) | Ditpolairud                                 | : | 1 unit;         |
| (i) | Satpolairud Polres                          | : | 6 unit;         |
| (2) | Rumah Dinas:                                |   |                 |
| (a) | T.450                                       | : | 14 unit;        |
| (b) | T.330                                       | : | 7 unit;         |
| (c) | T.250                                       | : | 16 unit;        |
| (d) | T.190                                       | : | 8 unit;         |
| (e) | T.170                                       | : | 30 unit;        |
| (f) | T.130                                       | : | 81 unit         |
| (g) | T.90  | : | 26 unit         |
| (h) | T.70  | : | 34 unit         |
| (i) | T.54  | : | 277 unit        |
| (j) | T.45  | : | 165 unit        |
| (k) | T.38  | : | 2.190 unit      |
| (l) | Non Standart                                | : | 1.051 unit;     |
| (m) | Flat (T.38, T.45, T. 54)                    | : | 269 unit;       |
| (n) | Rusun                                       | : | 20 unit.        |
| (3) | Bangunan Karya/Simpan Timbun:               |   |                 |
| (a) | Gudang                                      | : | 38 unit;        |
| (b) | Garasi                                      | : | 136 unit;       |
| (c) | Kandang Hewan/Satwa                         | : | 18 unit;        |
| (d) | Shelter (Penyimpanan Pesawat<br>Terbang)    | : | 2 unit;         |
| (e) | Pompa Bensin/Tangki Bawah<br>Tanah (SPBP)   | : | 6 unit;         |
| (4) | Bangunan Karya Harwat:                      |   |                 |
| (a) | Bengkel                                     | : | 3 unit;         |
| (b) | Rumah Sakit                                 | : | 1 unit;         |
| (c) | Poliklinik                                  | : | 31 unit;        |
| (d) | Rumah Tahanan                               | : | 5 unit;         |
| (5) | Bangunan Karya/Pendidikan/Latihan (Diklat): |   |                 |
| (a) | Ruang Kelas                                 | : | 7 unit;         |
| (b) | Ruang Perpustakaan                          | : | 3 unit;         |
|     |   |   | (c) Ruang ..... |

- (c) Ruang Latihan Olah Raga : 3 unit;
- (d) Barak : 31 unit;
- (6) Bangunan Karya Laboratorium:
  - (a) Laboratorium Kriminal : 1 unit;
  - (b) Laboratorium Kesehatan : 1 unit;
  - (c) Laboratorium Klinik Pengemudi : 18 unit;
  - (d) Laboratorium Komputer : 0 unit.
- (7) Bangunan Sosial Monumen:
  - (a) Tugu : 6 unit;
  - (b) Patung : 3 unit.
- (8) Bangunan Sosial Rekreasi:
  - (a) Balai Pertemuan : 39 unit;
  - (b) Gedung Kesenian : 3 unit;
  - (c) Gedung Olah Raga : 4 unit;
- (9) Bangunan Sosial Usaha:
  - (a) Toko Koperasi : 50 unit;
  - (b) Kantin : 23 unit;
- (10) Bangunan Sosial Ibadah:
  - (a) Masjid/Mushola/Langgar : 147 unit;
  - (b) Gereja : 1 unit;
  - (c) Pura : 2 unit;
- (11) Bangunan Sosial Sekolah Umum:
  - (a) TK : 68 unit;
  - (b) SD : 3 unit;
  - (c) SMP : 1 unit;
- (12) Bangunan Gedung Penunjang:
  - (a) Dapur : 7 unit;
  - (b) Ruang makan : 2 unit;
  - (c) Ruang Jaga/Piket : 52 unit;
  - (d) Kamar Mandi : 72 unit;
- (13) Instalasi Pertahanan:
  - Instalasi Komlek : 21 unit
- (14) Instalasi .....

## (14) Instalasi Utility:

- (a) Instalasi Air : 34 unit;  
 (b) Instalasi Listrik : 63 unit;

## (15) Prasarana Penerbangan:

- Tower/Menara Pengawas : 4 unit

## (16) Prasarana Latihan:

- (a) Lapangan Olah Raga : 35 unit;  
 (b) Lapangan Upacara/Apel : 40 unit;  
 (c) Kolam Renang : 0 unit;  
 (d) Lapangan Tembak : 12 unit.

## (17) Materil:

- (a) di seluruh Satker kewilayahan tingkat Polsek sudah dilengkapi sarana dan prasarana kendaraan bermotor R6, R4 dan R2 serta kendaraan air, alsus, alkomlek sebagai sarana pendukung kegiatan operasional, meliputi :

## i. Kendaraan Umum :

- i) Sepeda motor : 10.885 unit;  
 ii) Sedan : 534 unit;  
 iii) Jeep : 249 unit;  
 iv) Truck Sedang : 159 unit;  
 v) Bus Kecil : 647 unit;  
 vi) Bus Sedang : 94 unit;  
 vii) Bus Besar : 2 unit.

## ii. Kendaraan Khusus

- i) ambulance : 88 unit;  
 ii) mobil jenazah : 11 unit;  
 iii) Ranpen R4 : 39 unit;  
 iv) Ranpat Bus Kecil : 362 unit;  
 v) Ranpat Sedan : 475 unit;  
 vi) Ranpat Jeep : 71 unit;  
 vii) Ranpat Sepeda Motor : 5.150 unit;  
 viii) Ran Tangki Air : 2 unit;

ix) Ran .....

- ix) Ran Tangki BBM : 4 unit;
- x) Ran Tahanan : 23 unit;
- xi) Ran Unit Komplek : 9 unit;
- xii) Ran Unit Derek : 4 unit;
- xiii) Ran Satwa Anjing : 58 unit;
- xiv) Rantis Water Canon : 30 unit;
- xv) Rantis Sar : 6 unit;
- xvi) Rantis APC : 31 unit;
- xvii) Ran Yanmas : 67 unit;
- xviii) Ran Satwa Kuda : 2 unit;
- xix) Ran MMCP : 3 unit;
- xx) Ran Jihandak EOD : 5 unit;

iii. Kendaraan Air

- xxi) kapal patroli Klas C : 36 unit;
- xxii) sekoci : 1 unit;
- xxiii) perahu karet : 16 unit;
- xxiv) speedboat : 8 unit;

(b) guna mengantisipasi kerawanan dan kasus-kasus di wilayah jajaran Polda Jateng, telah dilengkapi senjata api yang memadai, meliputi :

- i. senpi genggam : 18.239 pucuk;
- ii. SMR : 128 pucuk;
- iii. senpi bahu : 10.013 pucuk;
- iv. senpi pinggang : 195 pucuk;
- v. peluncur : 55 pucuk.

d) adanya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja serta *reward* yang diberikan kepada personel Polri Polda Jateng diharapkan dapat mendorong kinerja dan memberikan motivasi yang tinggi terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

e) kemampuan .....

- e) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan *transnational crime* (terorisme, narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara (*illegal logging, illegal mining*) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) serta pemberian bantuan pada korban bencana alam sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- f) meningkatkan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan Kepolisian (Dikpol), pendidikan pengembangan umum (Dikbangum), pendidikan umum (Dikum) dan pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) dengan rincian data personel di Polda Jateng sebagai berikut:
- (1) Dikpol.
- (a) Akpol : 332 personel;
  - (b) Sepa/SIPSS : 262 personel;
  - (c) Dik Ba : 29.276 personel;
  - (d) Dik Tamtama : 2.656 personel;
  - (e) Latprajab PNS : 1.556 personel.
- (2) Dikbangum.
- (a) Sespimti : 10 personel;
  - (b) Lemhanas : 4 personel;
  - (c) Sesko TNI : 1 personel;
  - (d) PKN TK I : 5 personel;
  - (e) Sespimmen : 89 personel;
  - (f) PKN Tk II : 22 personel;
  - (g) S2 STIK/KIK : 9 personel;
  - (h) Sespimma/PKA : 216 personel;
  - (i) S1 STIK : 289 personel;
  - (j) Setukpa/SIP : 1.585 personel;
  - (k) PKP : 55 personel;
  - (l) PAG Pa : 1.788 personel;

(m) PAG.....

- (m) PAG Ba : 1.805 personel;
- (n) UDKP/UDPI : 152 personel.
- (3) Dikum.
  - (a) S3 : 16 personel;
  - (b) S2 Profesi : 12 personel;
  - (c) S2 : 1.437 personel;
  - (d) S1 Profesi : 64 personel;
  - (e) S1 : 10.976 personel;
  - (f) Diploma : 835 personel;
  - (g) SMA/Sederajat : 21.192 personel.
- (4) Dikbangspes.
  - (a) Intel : 1.090 personel;
  - (b) Reskrim : 1.860 personel;
  - (c) Lantas : 1.505 personel;
  - (d) Binmas : 735 personel;
  - (e) Sabhara : 749 personel;
  - (f) Polair : 330 personel;
  - (g) Brimob : 2.033 personel;
  - (h) Pembinaan : 5.734 personel.
- g) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangat pesat, hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi pemanfaatan teknologi modern berbasis IT untuk mendukung tugas-tugas ke depan seperti *System Filling and Recording*, pengembangan *E-Catpers*, pengembangan *E-Office* dan lain sebagainya;
- h) Peningkatan sarana prasarana dibidang kesehatan yang canggih dimiliki oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng sehingga pelayanan yang diberikan kepada anggota, keluarga dan masyarakat semakin meningkat.

2) Kelemahan .....

2) Kelemahan (*Weakness*)

- a) berdasarkan proyeksi penduduk BPS bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak 36.742.501 jiwa, terus mengalami peningkatan dalam jangka waktu tahun 2010 hingga 2020 sekitar 4,1 juta jiwa atau rata-rata 400 ribu setiap tahun. Jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah menurut hasil Sensus Penduduk sebanyak 18.472.627 jiwa, atau 50,28% sedangkan jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah menurut hasil Sensus Penduduk sebanyak 18.269.874 jiwa, atau 49,72% dari penduduk Jawa Tengah, sementara jumlah anggota Polri sebanyak 34.532 orang dan PNS Polri sebanyak 1.677 orang, dengan rasio perbandingan Penduduk : Polri yaitu 1 : 1.118 orang belum ideal bila dilihat secara riil dan personel Polda Jateng tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional Kepolisian (sebagian melaksanakan tugas staf atau fungsi pendukung) sehingga dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan dalam pelayanan terhadap masyarakat;
- b) dukungan anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Polri sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian dan belum dapat memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas, materiil dan kesejahteraan personel yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja Polri;
- c) sistem pengembangan kekuatan SDM Polri yang hanya menitikberatkan pada pendekatan demografi, sehingga apabila ditinjau dari aspek *Police Ratio* jumlah anggota Polri belum memadai;
- d) reformasi di bidang kultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan bila berurusan dengan Polri;
- e) masih rendahnya kemampuan anggota Polri dalam penguasaan bahasa asing (dihadapkan pada kejahatan transnasional yang meningkat), penguasaan teknologi komunikasi berbasis komputer, teknologi .....



teknologi dan biokimia dibidang kriminalitas modern, dalam pengetahuan dibidang kejahatan ekonomi, perdagangan, moneter, bisnis dan lingkungan hidup yang makin dituntut selalu siap dan dapat menghadapi perubahan pola kejahatan nasional dan internasional;

- f) sifat - sifat arogan yang masih kadang terjadi dimiliki oleh sebagian oknum dapat memicu terjadinya konflik dan masyarakat antar anggota yang berakibat pada situasi Kamtibmas;
- g) masih terbatasnya sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Polda Jateng sampai dengan tingkat Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri di kewilayahan berdampak pada pelaksanaan tugas sehari-hari yang belum dilaksanakan secara maksimal;
- h) masih terdapat pelayananan oknum anggota Polri yang diberikan kepada masyarakat kurang simpatik dan belum maksimal;
- i) sebagai anggota Polri selama melaksanakan tugas di lapangan;
- j) Personel Polda Jateng dengan sasaran yang harus dilayani belum seimbang, sehingga mengakibatkan sebaran Polri di lapangan terasa masih kurang, hal ini masih dirasakan oleh masyarakat sebagai penghambat dalam pelayanan;
- k) masih kurangnya sosialisasi peralatan modern/standar yang dimiliki RS Bhayangkara dalam memberikan pelayanan kesehatan personel Polri, keluarga dan masyarakat umum, sehingga masih banyak yang berobat diluar Rumah Sakit Polri;
- l) kekuatan Dokpol yang terstandarisasi sesuai level kemampuan belum terwujud secara merata di tingkat kewilayahan, mengingat dukungan Dokpol yang cepat dan tepat diperlukan setiap olah TKP;
- m) masih rendahnya ketrampilan dan kemampuan personel Polri di lapangan terutama dalam segi penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis informasi teknologi di bidang kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih;

n) Masih .....

- n) masih kurang transparannya personel fungsi Reserse Polda Jateng dalam penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, hal ini terlihat dari belum optimalnya penyampaian SP2HP kepada masyarakat;
- o) masih kurangnya peran personel Polri dalam mengemban fungsi Polmas di wilayah Jawa Tengah, sehingga komunikasi masyarakat dengan personel Polri tentang Kamtibmas masih belum maksimal;
- p) masih minimnya biaya pemeliharaan dan perawatan gedung sedangkan sebagian besar kondisi bangunan mako yang ada di jajaran Polda Jateng sudah rusak/ bangunan lama yang memerlukan perawatan khusus;
- q) fasilitas-fasilitas kesehatan Tingkat Pertama milik Polri di Kewilayahan belum sesuai dengan ketentuan dari BPJS, seperti lokasi Poliklinik masih bergabung dengan gedung perkantoran, alat kesehatan belum terpenuhi secara maksimal dan ada beberapa ijin operasional Poliklinik yang belum lengkap;
- r) sistem pengelolaan keuangan pada Poliklinik Tingkat Pratama belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada, dikarenakan belum ada wadah dalam pengelolaan;
- s) masih kurangnya peran personel Polri dalam mengemban fungsi Polmas di Wilayah Polda Jateng, sehingga komonikasi masyarakat dengan personel Polri tentang Kamtibmas masih belum maksimal;
- t) peran fungsi kesemaptaan dalam siklus manajemen SDM Polri dan rekrutmen, Pendidikan, penugasan, pemeliharaan dan pengakhiran tugas melalui kegiatan rikkes seleksi, rikes berkala dan Kesehatan preventif kesamaptaan belum dapat diselenggarakan secara komprehensif;
- u) masih kurangnya jumlah personel dalam pemenuhan satu desa/kelurahan satu bhabinkamtibmas dalam rangka deteksi dini permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
- v) masih adanya Kecamatan yang belum memiliki Polsek sehingga Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum sesuai harapan.

2) Peluang .....

2) Peluang (*Opportunity*)

- a) program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural;
- b) tuntutan masyarakat yang mengharapkan pelayanan Polri secara transparan, obyektif dan akuntabel dalam bidang hukum, mendorong lembaga Kepolisian untuk meningkatkan pelayanan yang lebih professional;
- c) tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam kompetensi dan profesionalisme kinerja Polri ditengah kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan mendorong Polri memfokuskan rencana kerjanya pada upaya meningkatkan profesionalisme dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Jateng;
- d) adanya partisipasi dari Instansi pemerintah atau swasta serta mahasiswa dan pelajar yang peduli dengan Kamseltibcar Lantas, hal ini akan memotivasi inovasi jajaran Lalu Lintas untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi tentang Program lalu lintas yang baru maupun penyampaian tentang tata tertib berlalu lintas yang baik dan sopan di jalan raya serta pelajaran lalu lintas yang telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional;
- e) adanya upaya-upaya Pimpinan pengemban fungsi pengawas internal untuk menyelenggarakan peningkatan kompetensi personil APIP dengan melakukan Diklat Auditing kerjasama dengan BPKP, pelatihan dengan pencerahan, arahan tehnis serta petunjuk-petunjuk pengawasan dengan menyesuaikan bijak-bijak pengawasan dari eksternal Polri;
- f) makin aktifnya kontrol eksternal dari DPRD, KPK, BPK, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Menpan RB, kaum intelektual/kampus,

tokoh .....

tokoh masyarakat dan tokoh agama serta LSM termasuk media massa merupakan kepedulian dari komponen masyarakat yang memotifasi peningkatan sumber daya dan kinerja Polri untuk semakin professional;

- g) terjalannya hubungan yang baik antara Polri dengan instansi terkait, termasuk unsur *Criminal Justice System (CJS)*, Pemda, DPRD, TNI, perguruan tinggi dan LSM akan mempermudah pelaksanaan tugas Polri;
- h) semakin besarnya tuntutan masyarakat atas penggunaan SCI (*Scientific Crime Investigation*) dalam proses penyidikan untuk memperoleh kepastian hukum, dengan tetap menjunjung tinggi HAM menuntut Polri untuk meningkatkan kemampuan personel Labor, Psipol dan Dokpol yang didukung sarana prasarana yang memadai;
- i) dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberian Hibah dana APBD kepada Polda Jateng dan jajarannya dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif;
- j) semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas Kepolisian khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan Siskamling, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM);
- k) adanya kegiatan preemtif dan preventif dengan meningkatkan kegiatan Bhabinkamtibmas, anggota Polmas dan kegiatan Turjawali oleh Polisi berseragam di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan di wilayah hukum Polda Jateng;
- l) meningkatnya kinerja Polri khususnya Polda Jateng dan jajarannya terutama dalam menangani 4 (empat) jenis kejahatan yaitu kejahatan transnational, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi membutuhkan penanganan yang lebih proaktif dengan mengedepankan pembangunan sinergi Kepolisian dengan lebih mendorong Polri dalam berkoordinasi, berintegrasi, dan sinkronisasi yang diwujudkan dengan membangun kerja sama yang erat (*partnership*) .....

- (*partnership*) dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan multi dimensi baik dengan masyarakat maupun instansi teknis pelayanan publik;
- m) tersedianya fasilitas website Polda Jateng dengan alamat domain <http://www.jateng.polri.go.id> dapat mendorong penyampaian informasi dari masyarakat untuk mengantisipasi gejolak masyarakat yang tidak puas dengan berbagai keputusan Pemerintah baik di tingkat Polsek maupun tingkat Polres dan di daerah jajaran Jateng;
  - n) kebijaksanaan pemerintah pusat dan daerah di bidang kesehatan masyarakat mendorong peningkatan upaya pelayanan masyarakat, dengan diberlakukan Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional di bidang kesehatan mendorong Polda Jateng untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai mitra;
  - o) terbentuknya peluang kerja sama dengan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan tugas sidik/lidik misalnya Bapedalda, Bea Cukai, Operator Telepon, BPKRI, BPKP, PT Sukofindo, LKPP, Dirjen Haki, Dirjen Bea Cukai, Disperindag, BPN dll;
  - p) terbentuknya RTMC (*Regional Traffic Management Centre*) sehingga memudahkan Polantas dalam memantau situasi dan kondisi lalu lintas jalan raya guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
  - q) Undang – Undang dan peraturan yang mengatur tentang penanganan gangguan keamanan dalam Negeri khususnya penanganan konflik sosial melibatkan Instansi terkait secara terpadu;
  - r) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi transportasi, informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Intelijen Keamanan dapat dijadikan program dalam memodernisasi intelijen Keamanan berbasis teknologi dan pelaksanaan tugas khususnya dalam pengumpulan bahan keterangan dapat lebih efektif.
  - s) terbentuknya Forum lalu lintas dan Angkutan jalan yang terdiri dari para Stake holder lalu lintas guna pemecahan masalah keselamatan berlalu lintas.

t) dukungan .....

- t) dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dari dana APBD yang cukup besar terhadap Polda Jateng dalam mendukung tugas dalam memelihara Kamtibmas di Wilayah Jawa tengah;
  - u) Dengan adanya Program Kapolri untuk mewujudkan Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) dengan enam belas Program Prioritas diantaranya Program 01 Penataan Kelembagaan kegiatan penguatan Polsek sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan aksi pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap maka sangat diperlukan adanya pembentukan tipe kesatuan kewilayahan di Jajaran Polda Jateng.
  - v) tuntutan masyarakat terhadap menurunnya gangguan Kamtibmas, sehingga diperlukan terobosan kreatif dalam manajemen Operasi Kepolisian serta sinergi antar fungsi dan instansi dalam pelaksanaan tugas Operasi guna mewujudkan kamtibmas yang kondusif;
  - w) Perselisihan antar Ormas dengan Ormas, Ormas dengan kelompok agama dan antar kelompok agama yang masih sering terjadi akan menimbulkan konflik di Jawa Tengah;
- 3) Ancaman (*Threats*)
- a) wilayah Jawa Tengah yang terletak di tengah tengah pulau Jawa yang merupakan merupakan jalur lintas antara DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali cenderung terjadinya kemacetan lalu lintas pada event event hari libur dan hari besar keagamaan;
  - b) wilayah terdapat gunung berapi yang masih beraktivitas vulkanit yang berpotensi terjadi bencana;
  - c) wilayah Jawa Tengah terdiri dari wilayah perairan laut apabila tidak dilakukan pengawasan ketat merupakan kerawanan berbagai kejahatan laut antara lain illegal fishing dan masuknya pihak asing;
  - d) jumlah penduduk Jawa Tengah yang cukup padat dan sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengar dan Suruh) .....

Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali) serta Tegal-Brebes-Slawi memberikan konsekuensi logis terjadi mobilitas orang barang yang cukup tinggi pula yang berpotensi terjadinya konflik sosial antar warga atau masyarakat;

- e) heterogenitas penduduk tinggi dan struktur usia muda semakin dominan sehingga berdampak terjadinya ledakan penduduk serta peningkatan jumlah pengangguran yang tidak disertai dengan peningkatan sumber daya manusia;
- f) ancaman terkait kelompok kanan di Jawa Tengah adalah dalam kelompok Islam Garis keras (Igaras) dengan Idiologi pendirian khilafah Islam dengan pemberlakukan syariat Islam secara penuh/kaffah dalam setiap sendi kehidupan dengan modus dukungan dalam bidang politik dalam pemerintahan baik parpol maupun pimpinan negara dan saat ini pergerakan yang efektif untuk pengumpulan massa dengan isu solidaritas sesama umat muslim yaitu dalam bentuk Reuni 212 dimana agenda politik setiap tanggal 02 Desember;
- g) bahaya latent komunis dan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada Radikal Kiri tetap merupakan bahaya latent yang senantiasa memanfaatkan setiap kerawanan yang timbul dalam masyarakat sehingga akan tetap menjadi ancaman yang dapat membahayakan Ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI;
- h) adanya golongan/kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi masyarakat dengan tujuan mengubah Idiologi Negara, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara menghasut, mengintimidasi, teror, mempengaruhi masyarakat untuk mengubah kebijakan pemerintah maupun keinginan untuk mendirikan Negara Islam (NII) maupun kekhilafahan sehingga akan tetap menjadi ancaman pada periode mendatang;
- i) status ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) secara resmi telah dicabut dengan diterbitkannya SK Menkum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017, namun ideologi Eks anggota HTI, FPI sangat .....

sangat sulit untuk dihilangkan sehingga sewaktu-waktu bisa muncul lagi dengan bentuk ormas lainnya, mereka bermanuver secara masif, baik di sosial media atau mendompleng nama organisasi besar dan menyebarkan dakwah soal negara khilafah;

- j) adanya ancaman bahaya dari kelompok masyarakat tertentu dengan cara-cara memanfaatkan giat masyarakat, politik dan sosial ekonomi serta budaya guna mempengaruhi massa dengan dalih memperjuangkan rakyat kecil untuk memasukan doktrin idiologi baru, hal ini mengakibatkan sering terjadinya benturan fisik antar kelompok yang bertentangan di lingkungan masyarakat;
- k) isu rasial Papua masih akan terjadi terutama memanfaatkan agenda peringatan HAM dan berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) namun dengan metode pemerintah saat ini dalam bentuk pembangunan secara merata dan adil (infrastruktur, sumberdaya manusia, penyamaan harga BBM) konflik rasial Papua senantiasa dapat diredam meskipun masih terjadi aksi kekerasan namun masih bersifat lokal dan tidak kontijensi/meluas;
- l) Pilkada serentak dan Pemilu mendatang akan dilaksanakan 2024 (Pileg dan Pilpres), pada tahun 2023 akan dilaksanakan pentahapan sengketa penetapan Parpol dan pengajuan daftar calon legislatif. Pelaksanaan agenda politik tersebut saat ini sudah menunjukkan peningkatan suhu politik terutama munculnya dukungan pada masing-masing capres yang rawan konflik internal parpol dengan manuver pembentukan kelompok simpatisan, selain kelompok simpatisan diperkirakan akan memunculkan lobi-lobi politik pada parpol besar dalam rangka dukungan sehingga rawan menimbulkan konflik eksternal parpol;
- m) adanya perbedaan pendapat dari tokoh masyarakat, elite politik dan cendekiawan dalam menanggapi setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat yang dapat berpengaruh timbulnya instabilitas dan gangguan keamanan;
- n) masih .....



- n) masih marak aksi unra yang dilakukan oleh masyarakat seperti LSM, buruh, mahasiswa dengan issue-isue sentral seperti pelanggaran HAM, KKN, penegakan hukum, tenaga kerja yang selalu mendiskreditkan setiap kebijakan pemerintah guna menjatuhkan kewibawaan pemerintah di mata masyarakat secara umum, hal ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan kebebasan dalam berdemokrasi;
- o) program legislasi produk UU rawan terjadinya berbagai kepepetingan ekonom, politik tertentu yang berpotensi menimbulkan kekisruhan politik diinternal DPR yang berimbas pada timbulnya polemik maupun gugatan serta mendapatkan penolakan dari elemen masyarakat melalui unjuk rasa dan penyebaran opini;
- p) pada tahun 2023 akan dilaksanakan Pilkades diwilayah 13 Kab/Kota Jawa Tengah, yang mana pelaksanaan Pilkades memiliki ancaman gangguan kamtibmas yang sangat tinggi karena akan menimbulkan disintegrasi antar warga masyarakat akibat dari perbedaan dukungan dan isu yang khas dalam pilkades adalah *money politic* sehingga setiap pihak yang kalah akan berusaha mengangkat isu kecurangan tersebut guna memicu pendukung untuk menolak hasil dengan aksi unra dengan harapan Pilkades diulang namun situasi kontijensi sangat mudah terjadi terutama bentrok antar pendukung;
- q) meningkat adanya beberapa elemen masyarakat yang mengkritisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, hal ini akan menjadi kerawanan pada Pilkada serentak dan Pemilu Legislatif serta isu politik menjelang Pilpres tahun 2024;
- r) kemajuan teknologi berupa handphone berkamera/android dan maraknya sosial media sering di salah gunakan untuk berbuat melanggar hukum, mendeskreditkan pemerintah, pengerahan massa untuk berbuat sesuatu, membully personal maupun kelompok, bahkan digunakan untuk merekrut pelaku terorisme sehingga saat ini media sosial merupakan Panglima untuk melakukan kegiatan bersifat massa baik kegiatan positif maupun negative;
- s) dibidang .....

- s) dibidang Perdagangan kemajuan teknologi juga sudah mengubah pola hidup masyarakat dengan bergeser ke transaksi jual beli *online*, maraknya toko *online* menyebabkan tinggi dan ketatnya persaingan, sehingga antar toko *online* saling bersaing memberikan program-program diskon. Program diskon dari toko *online* yang tidak dilengkapi dengan pengawasan internal dan eksternal dapat menimbulkan kegaduhan dan masalah. Banyak juga ditemukan toko *online* yang memasarkan produk-produk ilegal dan melakukan penipuan;
- t) kenaikan harga sembako setiap menjelang puasa, Idul Fitri dan Natal serta akibat perubahan cuaca yang ekstrim selalu terjadi dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang akan mempengaruhi angka kriminalitas;
- u) adanya program-program Pemerintah di bidang ekonomi seperti penyaluran beras bagi masyarakat kurang mampu, bantuan langsung kepada keluarga pra sejahtera, subsidi listrik, BBM dan pupuk bagi masyarakat serta program lainnya dimungkinkan masih menimbulkan kerawanan-kerawanan dan kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaannya;
- v) maraknya pinjaman *online* (Pinjol) ditengah pandemi Covid 19 menjadi daya tarik tersendiri akibat pemenuhan kebutuhan dengan jalur singkat dengan iming-iming kemudahan prosedur dan bunga ringan namun dalam prakteknya bunga yang dibebankan sangat tinggi sehingga muncul penolakan pelunasan namun dari pihak Pinjol menggunakan strategi melakukan intimidasi dan menyebarkan pada kontak terdekat peminjam sehingga menimbulkan rasa malu dan keresahan sehingga muncul aksi bunuh diri dan stress;
- w) maraknya pertambangan Galian C yang tidak berijin/illegal di beberapa lokasi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi serta merusak prasarana khususnya jalan, Pemerintah maupun aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak sesuai prosedur dan aturan yang ada sehingga tidak muncul permasalahan baru;

x) pembangunan .....

- x) pembangunan proyek infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) diwilayah Jawa Tengah yang terus mendapat penolakan dari masyarakat terdampak. (Pembangunan Bendungan dan Jalan Tol);
- y) tuntutan dari para pekerja berkaitan dengan UMR/UMK Kabupaten/Propinsi yang masih berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dikalangan pekerja, buruh dan karyawan;
- z) kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM jenis Premium dan Solar serta kenaikan harga BBM termasuk kenaikan Tarif Dasar Listrik oleh Pemerintah dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan pengaruh naiknya harga barang – barang kebutuhan pokok;
- aa) wilayah Jawa Tengah terdapat banyak obyek wisata yang berskala internasional dan nasional yang selalu dikunjungi wisatawan luar negeri dan dalam negeri seperti cagar alam dan cagar budaya: Keraton Surakarta, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Museum kereta api, Kawasan wisata Gunung Merapi, Kawasan wisata, Kawasan wisata Gunung Merbabu, Kawasan wisata Gunung Slamet, Kawasan wisata Gunung Sindoro Sumbing, Sepanjang deretan pesisir pantai utara mulai dari Kab. Rembang, kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Demak, Kab. Pekalongan, Kab.Tegal. Pariwisata di kawasan perkotaan: Kota Lama Semarang, Pariwisata keagamaan: Klenteng Sam Po Kong, Masjid Demak, petilasan petilasan. Keberadaan objek pariwisata di satu sisi menunjang pendapatan daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah namun bersamaan dengan itu memunculkan kerawanan/ancaman tindak kejahatan pencurian, kejahatan jalanan, pemalsuan uang, pencucian uang, penyalahgunaan narkoba, serta dampak dari penyebaran virus Covid-19 varian baru Omicron, Delta dll);
- bb) gelombang penolakan UU *Omnibus law* masih akan terjadi pada tahun 2023 dan dari hasil putusan MK menyatakan bahwa UU *Omnibus law* Inkonstitusional sehingga perlu diperbaiki dalam jangka 2 tahun dan Presiden menyatakan tetap dilaksanakan dengan perbaikan sehingga masih menyisakan ketidakpuasan pada akhir tahun 2021, hal tersebut akan berlanjut pada tahun 2022-2023 dalam bentuk .....

- bentuk gelombang protes dan unjukrasa terkait UU *Omnibus law* dan UMK hingga terdapat kejelasan dari Pemerintah untuk membatalkan;
- cc) masih berlangsungnya 4 (empat) jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, trans nasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi termasuk terorisme yang merupakan domain tugas Polri, menentukan kemampuan Intelijen Keamanan untuk mengungkap dan menaggulangi;
- dd) gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat yang paling menonjol dan diperkirakan akan terus berkembang serta menjadi ancaman di Tahun 2023 antara lain: kejahatan cyber, penipuan dan penggelapan, curranmor, curat, curas, anirat, pembakaran/kebakaran, pengrusakan, pembunuhan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, KDRT, kejahatan yang melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dan teror melalui penyebaran berita hoax serta ujaran kebencian;
- ee) kesadaran, ketaatan, menjunjung dan menegakkan supremasi hukum, belum menunjukkan peningkatan yang pesat dan merata baik di kalangan aparatur pemerintah, masyarakat maupun penegak hukum;
- ff) adanya kecenderungan gangguan kamtibmas terjadinya tawuran antar kelompok yang berkembang menjadi antar desa/kampung seperti bentrok PSHT di Kab. Sragen, Karanganyar, Sukoharjo Surakarta, wonogiri, Magelang Kab/ Kota;
- gg) teror dan aksi kekerasan yang terjadi merupakan upaya yang terencana dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Jawa Tengah untuk menciptakan kekacauan dan kerusuhan masyarakat antara lain melalui telepon, selebaran dan isu–isu yang mengatas namakan SARA;
- hh) perkembangan teknologi informasi berbasis internet yang bersifat publik dan global sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan salah satunya adalah pemanfaatan teknologi untuk modus operandi peredaran narkoba;

ii) ancaman .....

- ii) ancaman aksi terorisme masih akan mewarnai sepanjang tahun mengingat Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang rawan digunakan sebagai tempat perekutan, pelatihan maupun sasaran dari aksi teror;
- gg) ancaman penyerangan terhadap anggota Polri maupun fasilitas Polri dalam bentuk teror bom melalui kiriman barang/paket ke obyek-obyek vital, sarana fasilitas umum maupun perorangan bahkan bom bunuh diri masih memungkinkan terjadi dan digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu maupun perorangan dalam upaya menciptakan instabilitas kamtibmas maupun upaya menciptakan keresahan masyarakat karena cara tersebut dianggap sangat efektif dalam upaya mencapai target tujuannya;
- kk) Potensi Gangguan (PG) keamanan masih sangat luas, mulai dari konflik-konflik yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keanekaragaman suku, budaya dan agama, euphoria kebebasan menyampaikan pendapat, konflik kepentingan partai politik, jaringan perdagangan dan pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif), aliansi yang makin luas pada *white collar crime*, kejahatan terorganisir dan penguasa informal yang menjadikan penegakan hukum makin kompleks;
- ll) Ambang Gangguan (AG) keamanan yang setiap saat muncul dalam kehidupan normal masyarakat baik disetiap tempat dan waktu, mulai dari persengketaan tanah atau harta warisan, terganggunya ekosistem atas bencana alam yang terjadi maupun kebakaran atas ulah manusia;
- mm) Gangguan Nyata (GN) keamanan yang diakibatkan tidak teratasinya Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (AG) tersebut di atas, sehingga menyulut tindakan kejahatan di tengah kehidupan masyarakat antara lain yang tergolong dalam 4 (empat) jenis kejahatan .....

kejahatan yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional termasuk terorisme, kejahatan terhadap kekayaan Negara, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, berdampak terganggunya keamanan secara meluas dan ketidaktertiban berlalulintas sehingga memerlukan pengerahan kekuatan yang besar untuk menanggulangnya;

- nn) banyaknya mantan napi narkoba dan napi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- oo) munculnya obat-obatan/zat psikoaktif baru seperti golongan *Cetamine, Piperazines, Synthetic Cathinones, Cannabis Sintetis* dan Zat tanaman dasar (Kratom), yang belum diikuti dengan aturan hukum yang mengatur;
- pp) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi dan globalisasi berdampak munculnya kejahatan jenis baru (*new type crime*) dan kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*);
- qq) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu permasalahan;
- rr) kebijakan Pemerintah yang menghapus pajak pertambahan nilai bagi kendaraan bermotor tertentu dan kemudahan untuk memiliki kendaraan baru dengan cara kredit mendorong semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di jalan, jika tidak diantisipasi dengan perubahan infra struktur misalnya dengan pelebaran jalan dan pendidikan tentang lalu lintas kepada pengguna jalan, maka hal tersebut berpotensi munculnya kemacetan lalu lintas, kasus laka lant, pelanggaran lalu lintas dan kejahatan lainnya;

2. Identifikasi .....

## 2. Identifikasi Masalah

Setelah mempelajari beberapa aspek kehidupan masyarakat dan kondisi internal serta eksternal Polda Jateng yang dianalisis melalui analisis SWOT, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dan mungkin terjadi pada tahun 2023, yaitu:

- a. dinamika Politik Jawa Tengah yang meningkat dengan adanya isu politik identitas yang menyebabkan masyarakat terpolarisasi/terkotak-kotak memicu konflik horizontal dan memicu peningkatan sikap intoleransi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu tahun 2024;
- b. munculnya konflik penempatan baliho dukungan terhadap para Capres/Cawapres, partai politik dan calon legislative yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang akan diperebutkan oleh para pendukungnya pada pelaksanaan Pemilu 2024;
- c. kebijakan pemerintah terkait penyesuaian level penerapan protokol kesehatan namun pandemi Covid-19 belum sepenuhnya hilang sehingga transformasi digital untuk kelangsungan layanan publik dan aktivitas ekonomi menjadi salah satu alternatif dalam meminimalisir resiko penularan;
- d. masih banyaknya usulan pembangunan, Pembentukan Polsubsektor, peningkatan Tipe Polsek Tipe D menjadi Tipe C dan Polsek Tipe C menjadi Polsek Tipe B di Polda Jateng yang belum teralisasi;
- e. terbatasnya formasi Jabatan AKBP, Kompol dan PNS Gol III/IV berdampak pada banyaknya personel yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional, disatu sisi masih terdapat kekurangan personel Brigadir dan ASN Gol II untuk menduduki formasi Bamin sehingga dalam pelaksanaan tugas belum sesuai dengan beban pekerjaan;
- f. adanya surat edaran Menpan RB nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan Instansi yaitu menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK serta tidak melakukan perekrutan pegawai Non-ASN sedangkan 75% pegawai Rumkit Bhayangkara adalah Non-ASN;
- g. eskalasi keamanan dalam Negeri yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19, PMK dan penyebaran virus lainnya, serta dinamika Politik global sehingga memerlukan perhatian khusus Polri dalam menjaga kamtibmas yang aman dan kondusif;
- h. konflik .....

- h. konflik SARA terjadi karena adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu dan paham politik menjadi pemicu munculnya konflik antar etnis/suku dan umat beragama hal ini agar tidak terjadi perlu dilakukan pencegahan;
- i. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan terjadi ditahun 2023, serta masih akan tetap menyuarakan ideologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
- j. pelayanan prima Kepolisian yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi informasi sampai komunitas terkecil belum tergelar secara optimal sehingga masih ada komplain dari masyarakat;
- k. kemampuan APIP untuk melakukan tugasnya sebagai pengawas fungsional guna membantu obyek meminimalisir penyimpangan/kebocoran menejemen organisasi yang berdampak pada kerugian negara belum dapat secara optimal;
- l. masih terbatasnya jumlah anggota yang memiliki sertifikasi penyidik/kualifikasi/kejuruan sebagai penyidik/penyidik pembantu serta masih ditemukan penyidik/penyidik pembantu yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya;
- m. keterbatasan penyidik yang berpengalaman dan memiliki kemampuan penguasaan IT dengan latar belakang pendidikan tindak pidana IT yang ditempatkan pada Satker yang menangani kasus *cyber crime*;
- n. maraknya gangguan kamtibmas karena adanya pemulihan akibat pandemi Covid-19 meliputi tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor sehingga diperlukan terobosan kreatif dalam manajemen Operasional Kepolisian serta sinergi antar fungsi dan instansi guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif,
- o. situasi dan Kondisi gangguan Kamtibmas yang berimplikasi kontijensi tidak dapat diprediksi karena adanya bencana alam, konflik sosial, dan terorisme;
- p. tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga diperlukan hubungan dengan Instansi/non lembaga guna pemulihan/rehabilitasi terhadap para korbannya;

q. kurang .....



- q. kurang optimalnya sistem pengendalian intern dalam organisasi di lingkungan polri terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran polri dan barang bukti;
- r. masih banyaknya komplain dari para pencari keadilan, baik pengadu, pelapor, maupun terlapor/tersangka yang merasa tidak puas atau di perlakukan tidak adil dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana;
- s. masih terdapat penyidik yang integritasnya kurang, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang maupun kurang bertanggung jawab dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- t. belum optimalnya sarana prasarana yang dimiliki Polda Jateng baik kualitas maupun kuantitas dalam mendukung pelaksanaan tugas masih terbatasnya Ranmor R4 sebagai pendukung pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- u. adanya kerawanan terjadinya tindak pidana dalam pelaksanaan Pemilu yang perlu di antisipasi terkait adanya isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada materi kampanye di media sosial kepada pemilih akibat dari persaingan antar kandidat;
- v. masih kurangnya penyajian data informasi kriminal terkait belum efektifnya sistem teknologi informasi di Polda Jateng dan Polres jajaran yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengakses pelayanan kepolisian;
- w. peran fungsi intelijen keamanan sebagai pengemban tugas deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan ketidakseimbangan SDM yang ada untuk mengcover permasalahan yang begitu cepat berkembang di masyarakat;
- x. masih kurangnya sarana prasarana Ranmor R.4/R.6 sebagai alat untuk pergeseran pasukan Dalmas Polda Jateng dan jajarannya terutama Truk dan Bus;
- y. dukungan BBM masih belum memadai dengan seringnya pergeseran pasukan ke jajaran Polda Jateng;
- z. masih terbatasnya kendaraan khusus yang dimiliki oleh Polres Jajaran Polda Jateng untuk mendukung kegiatan tugas Polri:

a.a. peralatan .....

- aa. peralatan SAR yang dimiliki Polda Jateng belum sesuai dengan kebutuhan letak dan kondisi geografis Jawa Tengah;
- bb. masih terbatasnya ketersediaan Almatsus SAR, JIBOM, WANTEROR, ANTI ANARKIS, KBR (Kimia, Biologi, Radioaktif) dan Ransus guna mendukung pelaksanaan Tupoksi Brimob dan penguatan Brimob dalam mendukung Densus 88/AT;
- cc. masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah, dan fatalitas korban meninggal dunia serta pelanggaran lalu lintas yang dikarenakan belum tertibnya masyarakat dalam berlalulintas guna mewujudkan lalu lintas yang bebas dari kecelakaan (*Zero Traffic Accident*);
- dd. masih adanya penempatan personel yang tidak sesuai dengan kompetensinya, baik dari hasil pelatihan kemampuan, riwayat penugasan (keahlian) dan bersertifikat sesuai dengan fungsinya, sehingga mutasi personel masih terkesan hanya mencari pangkat/jabatan, sementara personel yang memiliki kemampuan pendidikan dan memenuhi persyaratan kesulitan untuk mendapatkan Jabatan/Pangkat;
- ee. masih terbatasnya fasilitas pendukung kesejahteraan personel Polri dalam bentuk rumah dinas/asrama maupun program perumahan mandiri, sehingga masih banyak anggota yang tinggal diluar kota, kontrak dan numpang orangtua;
- ff. belum adanya wadah konselor dan assessor di dalam jabatan struktural maupun fungsional;
- gg. dukungan anggaran belum dapat memenuhi semua kebutuhan operasional penanganan lidik sidik tindak Pidana Khusus dan tugas yang lainnya, sehingga dalam pelaksanaannya masih menggunakan skala prioritas;
- hh. masih banyaknya komplain atau pengaduan dari masyarakat yang tidak diselesaikan dengan tuntas, berdampak pada pengaduan ke pihak lain (Komnas Ham, Kopolnas, Ombudsman, Presiden dan lain lain);
- ii. kekurangan tenaga organik baik perawat/dokter spesialis maupun dokter umum dipenuhi dengan menerima dokter dari luar sebagai dokter mitra dan serta perawat sebagai Tenaga Kontrak sehingga pendapatan rumah sakit sebagian besar untuk menggaji/memberikan honor tenaga tersebut;
- jj. fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standart sehingga banyak pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih lengkap fasilitas kesehatannya;
- kk. masih .....

- kk. masih tingginya angka kriminalitas (CT) dengan kemampuan penyelesaian (CC) relatif masih rendah, hal ini dikarenakan SDM personel Reserse baik kualitas dan kuantitas masih terbatas serta perekrutan personel Reserse belum maksimal;
- ll. penanganan tindak pidana pemilu dimana diperlukan penanganan secara profesional, transparan dan akuntabel dengan membentuk tim Sentra Gakkumdu tingkat Polda sampai kewilayahan;
- mm. meningkatnya komplain masyarakat dan pengaduan masyarakat untuk menindak lanjuti diperlukan supervisi, asistensi dan gelar perkara, audit investigasi khususnya di wilayah Jajaran Polda Jateng dan pemeriksaan pendahuluan apabila terjadi pelanggaran disiplin/kode etik profesi polri;
- nn. masih terbatasnya personel Bhabinkamtibmas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Polda Jateng dalam rangka pelaksanaan tugas dilapangan;
- oo. masih banyak potensi konflik sosial yang berkaitan dengan pertanahan, kehutanan, pertambangan (galian C), pembangunan obyek vital dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM yang memerlukan perhatian dan penanganan secara optimal;
- pp. wilayah Polda Jawa Tengah yang letaknya strategis berbatasan dengan Polda DIY, Polda Jatim dan Polda Jabar serta terdapat Bandara Internasional maupun pelabuhan yang berpotensi keluar masuknya Narkoba di Jawa Tengah;
- qq. berkembangnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dimanfaatkan oleh penyalahguna narkoba untuk peredaran gelap Narkoba;
- rr. belum optimalnya koordinasi lintas sektoral (BNN, Bea dan Cukai, Imigrasi, dll) yang disebabkan karena masih kurang memahami makna kerjasama sehingga masih adanya ego sektoral serta ingin menonjol sendiri dari masing-masing instansi terkait;
- ss. adanya kendaraan dinas dan sarana prasarana lainnya yang belum masuk dalam data Simak BMN sehingga menjadi kendala pemeliharaan dan perawatanya;
- tt. belum optimalnya pelaksanaan pembekalan ketrampilan dan penyaluran bagi personel yang akan memasuki masa pensiun sehingga masih banyak pegawai negeri pada Polri yang pensiunnya tidak siap untuk melaksanakan usaha sendiri;
- uu. peredaran .....

- uu. peredaran gelap produk farmasi yang meliputi obat, makanan-minuman, kosmetik dan obat tradisional ilegal/palsu yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia masih tersebar di seluruh Indonesia;
- vv. belum seimbangnya jumlah kelas dengan daya tampung barak (daya tampung barak 1.000 serdik dan kelas yang tersedia hanya 24 kelas sehingga dibutuhkan penambahan sebanyak 16 kelas).

## II. TUJUAN DAN SASARAN

### 1. Visi dan Misi

#### a. Visi

##### 1) Visi Polri:

“Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib”

##### 2) Visi Polda Jateng

“Terwujudnya Jawa Tengah Yang Aman dan Tertib”

#### b. Misi

##### 1) Misi Polri

Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat;

##### 2) Misi Polda Jateng

Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat;

### 2. Tujuan Jangka Menengah

#### a. Tujuan Jangka Menengah Polri

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) mewujudkan Polri yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polri;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

#### b. Tujuan Jangka Menengah Polda Jateng

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) mewujudkan Polda Jateng yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polda Jateng;

5) menerapkan .....

5) menerapkan manajemen Polda Jateng yang terintegrasi dan terpercaya.

### 3. Sasaran Prioritas

#### a. Sasaran Prioritas Polri

Sasaran Prioritas Polri tahun 2023 yang terdapat pada surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Memantapkan Kinerja Harkamtibmas guna Menciptakan Rasa Aman di Tengah Masyarakat”;
- 2) **kedua** “Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polri”;
- 3) **Ketiga** “Penegakan Hukum yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”;
- 4) **Keempat** “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDMPolri”;
- 5) **kelima** “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern”;
- 6) **keenam** “Penguatan Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

#### b. Sasaran Prioritas Polda Jateng Tahun 2023

Sasaran Prioritas Polda Jateng tahun 2023 yang sudah disesuaikan dengan surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Memantapkan Kinerja Harkamtibmas guna Menciptakan Rasa Aman di Tengah Masyarakat Jawa Tengah”;
- 2) **kedua** “Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polda Jawa Tengah”;
- 3) **Ketiga** “Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”;
- 4) **Keempat** “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Jawa Tengah”;
- 5) **kelima** “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polda Jawa Tengah yang Modern”;
- 6) **keenam** “Penguatan Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Polda Jawa Tengah”.

III. ARAH .....

### III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2023.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2023, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Memantapkan Kinerja Harkamtibmas guna Menciptakan Rasa Aman di Tengah Masyarakat”**, yaitu:

1) meningkatkan peran Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan situasi gangguan Kamtibmas lainnya;

*(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131);*

b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

*(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131);*

c) mengembangkan manajemen operasi Baintelkam Polri;

*(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131);*

d) melaksanakan penelitian dan survei terhadap persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya;

*(giat5067/progDukma/SP1/SS1/IKU1/PPKprog4,giat11,renaksi41,42,43);*

2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas dan terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;

*(giat .....*

- (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,14,renaksi51,55*);
- b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi;  
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi65*);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta Kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;  
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,15,renaksi46,47,56,57,59*);
- d) menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik sektarian yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme;  
(*giat3143/progLidikSidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi60,61*);
- e) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media *online* dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris;  
(*giat3143/progLidiksidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi63*);
- f) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;  
(*giat3143/progLidikSidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi64*);
- g) melaksanakan kerjasama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya;  
(*giat3143/progLidikSidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi65*);
- h) menetralsir .....

- h) menetralsir dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas;  
(*giat3149/progDukma/SP1/SS1/IKU1/PPKprog13,giat43,renaksi151,152*);
- i) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;  
(*giat3149/progDukma/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi46,51,160,161*);
- j) meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan Kriminalitas;  
(*giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi48*);
- k) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan;  
(*giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi48*);
- l) meningkatkan kegiatan Patroli dan pengamanan di tempat obvit/obvitnas dan tempat pariwisata;  
(*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi50,51*);
- 3) meningkatkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka Harkamtibmas untuk mendukung penanganan *Covid-19* saat "*New Normal*" dengan melibatkan peran aktif masyarakat;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;  
(*Giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat21,renaksi79,80*)
- b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;  
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat21,renaksi79,80*);
- c) pembinaan .....



- c) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan program “*kampung tangguh*” dan asistensi penguatan KBPPP;  
*(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi46,47,51);*
- d) melanjutkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas;  
*(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,6,giat12,23,renaksi49,91);*
- 4) melaksanakan penanganan konflik secara humanis;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejala sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;  
*(giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi60,64,65);*
- b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;  
*(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat14,renaksi54,55);*
- 5) meningkatkan Kamseltibcarlantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli lintas;  
*(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi49);*
- b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;  
*(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27,28,renaksi49,107,112);*

c) meningkatkan .....

- c) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat obvit/obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung *PEN* serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;  
*(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27,renaksi49,50,107);*
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa dan bencana;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan *stakeholders* dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah;  
*(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,32renaksi74,78,129);*
- b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;  
*(giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,32renaksi74,78,129);*
- c) memetakan masyarakat Desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;  
*(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9,giat30,renaksi123);*
- d) bersama instansi terkait bekerjasama dalam penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan gempa dan bencana;  
*(giat3072,5076/progDukma,4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat32,renaksi31,129);*
- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/internasional serta pembangunan ibukota negara baru tahun 2023;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penanggulangan .....

- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi serta mengoptimalkan kekuatan Brimob Polri dan fungsi kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta saat *event* nasional/internasional berlangsung;  
*(giat5079,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPK prog5,giat18,renaksi73,116);*
- b) melaksanakan pengamanan *Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR) di Bali;  
*(giat5079,3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPK prog5,giat18,renaksi73);*
- c) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada *event* nasional/internasional tahun 2023;  
*(giat3130,3133,5079,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,ren aksi73);*
- d) Melaksanakan pengamanan pembangunan ibukota negara baru (IKN) di Kalimantan;  
*(giat3130,3133,5079,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ PPK prog9,giat30, renaksi116);*
- 8) Meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa; penanganan konflik sosial; dan menjalin sinergisitas polisonal serta gangguan keamanan bersenjata; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengkoordinasikan kesiapan personel Polri untuk mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan Ibu Kota Negara baru;  
*(giat3130,5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9giat30 ,renaksi116);*
- b) melaksanakan dan mengkoordinasikan Kontijensi dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik, bencana dan ancaman terorisme;

*(giat .....*

- (giat3130,5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPK prog10,giat17,renaksi66);*
- c) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;  
*(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat17, renaksi69);*
- d) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif;  
*(giat5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat19,20,ren aksi74,78);*
- e) melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat;  
*(giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPK prog5,giat19,20,renaksi74,78);*
- f) tergelarnya personel dikawasan obvitnas dan objek tertentu;  
*(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat 12,27,renaksi50,51,107);*
- g) melaksanakan kegiatan pelayanan pelacakan dan penangkalan;  
*(giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,30,renak si50,120);*
- h) memperkuat Binmas Noken dengan melibatkan peran Bhabinkamtibmas;  
*(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat14, renaksi54,55);*
- 9) meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan Kerjasama antara Polri dan Kementrian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi polisional;  
*(giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat20, renaksi78);*
- b) peningkatan .....

- b) peningkatan kerjasama KL terkait guna mendukung Kerjasama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerjasama Bilateral dan Multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra Polri/Indonesia di mata Internasional;  
*(giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat22,renaksi82,83);*
- c) meningkatkan Kerjasama keamanan dan ketertiban internasional di wilayah perbatasan;  
*(giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat22,renaksi81);*
- d) meningkatkan kerjasama dengan BNPT dalam menjalankan program kontra radikalisme, kontra ideologi, kontra propaganda dan moderasi beragama;  
*(giat3120,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,Renaksi62);*
- 10) meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;  
*(giat3134,4342/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi48);*
- b) patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan;  
*(giat3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi46);*
- 11) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;

*(giat .....*

- (giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70);*
- b) penyelenggaraan pengamanan objek vital;  
*(giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70);*
- c) penanggulangan keamanan dalam negeri;  
*(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70);*
- d) pembinaan operasi kepolisian;  
*(giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70);*
- e) penindakan tindak pidana umum;  
*(giat3142/progLidikSidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70);*
- 12) meningkatkan penguatan Polri di wilayah keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) membangun kemampuan operasional Brimob Polri dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum awal) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;  
*(giat,3130,5087,3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi48,50);*
- b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, obvit/obvitnas dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni;  
*(giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi48);*
- c) meningkatkan .....

- c) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni;  
 (giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi48);

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polri”**, yaitu:

- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta Pelayanan Keliling di Bidang Lalu Lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan Identifikasi sebagai alat kontrol dan data Forensik Kepolisian;  
 (giat3133,3084/progHarkamtibmas,progAlmatsusSarprasPolri/SP2/SS2/IKU1,IKP4b/PPKprog4,11,giat9,10,37,40,renaksi33,37,38,135,141,142,144);
- b) meningkatkan pengembangan Registrasi dan Identifikasi dengan memberikan jaminan Legitimasi atas kemampuan Pengemudi dan kendaraan bermotor;  
 (giat3133,3071,3084,5055/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/PPKprog4,11,giat9,10,37,40,renaksi33,37,38,135,141,142,144);
- c) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal dilokasi *afirmatif* (menguatkan) dikawasan perbatasan;  
 (giat3133,3071,3084,5055/progHarkamtibmas,progdukma/SP2/SS4/IKP4b/PPKprog 11,giat37,38,renaksi135,136,137,139);
- 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melakukan .....

- a) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK *online*, SIM dan STNK;  
 (giat3112,3133/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4b/PPKprog11, giat40,renaksi141,142,144);
- b) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran;  
 (giat3072/progDukma/SP2/SS5/IKP5e/PPKprog3,giat8,renaksi31);
- c) mengoptimalkan operator (*Out Sourcing*) untuk *Helpdesk Support* aplikasi *Binmas Online System* (BOS);  
 (giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4d/PPKprog5,giat14renaksi54,55);
- d) meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan Intelkam Polri melalui layanan *drivethru* perpanjangan SKCK dan layanan SKCK *delivery* di 34 Polda dan Jajaran Polres;  
 (giat3084,3133/progAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4b/PPKprog11,giat40,renaksi141,144);
- 3) meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang *online* dan humanis serta berbasis TIK;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online*;  
 (giat5051/progDukma/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renaksi39,40);
- b) menyusun standar pembangunan SPKT *online* dan RPK sesuai SPM;  
 (giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renaksi38);
- 4) mengoptimalkan *quick response* Kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengkajian terhadap aturan/SOP pelayanan publik yang berbelit-belit;

(giat .....



- (*giat4340/progDukma/SP2/SS5/IKP5g/PPKprog11,giat38,renaksi139*);
- b) mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;  
 (*giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/PPKprog9,giat32,renaksi123*);
- c) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan obyek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit;  
 (*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27,renaksi50,107*);
- d) mengelola kegiatan *respon time* di Samapta Mabes Polri dan kewilayahan;  
 (*giat3130/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/PPKprog5,9,giat12,30,renaksi48,117*);
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan Hukum yang Transparan dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”**, yaitu:
- 1) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia;  
 (*giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi84*);
- b) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
 (*giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog5,6,giat16,23,renaksi60,61,94,95*);
- c) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan *asset recovery*),

Narkoba .....

- Narkoba (TPPU), Terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;  
 (giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi85,86,87,88,94,95,98);
- d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);  
 (giat3145/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi86);
- e) melaksanakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan.  
 (giat3140/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,Renaksi84);
- f) penanganan kejahatan pada ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat.  
 (giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi88);
- g) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring;  
 (giat3130,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi92,93);
- h) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;  
 (giat3141,3140/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,Renaksi89,90);
- i) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti.  
 (giat3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi96);
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan .....

- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;  
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKP1/PPK prog6,giat23,renaksi93*);
  - b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP;  
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKP2/PPK prog6,giat23,renaksi93,96*);
- 3) mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;  
(*giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog16,giat51renaksi176,177*);
  - b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran Birowassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog14,giat47,renaksi162,163*);
  - c) mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan dan transparansi;  
(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi97*);
- 4) meningkatkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengintegrasikan *database* kriminalitas dari seluruh satker dilingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya;  
(*giat .....*

(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi100*);

- b) standarisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*);

(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi99*);

- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”**, yaitu:

- 1) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era *police 4.0*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan penataan kurikulum yang meliputi 70% praktek dan 30% teori pada seluruh pendidikan baik diktuk, dikbang dan dikbangum;

(*giat5070/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4,renaksi13,14*);

- b) *upgrading* dan sertifikasi gadik/instruktur;

(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4,renaksi11,13,14*);

- c) pelaksanaan latihan harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator yang *Worldclass Standar*;

(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP1/SS1/IKU3b/PPKprog3,giat4,Renaksi14*);

- d) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang *“Worldclass Standar”*;

(*giat3100,5076,3130,5087/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtibmas/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4renaksi14,16*);

- e) peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang *Worldclass Standar*;

(*giat3100,3151,3141/progProfesionalismeSDMPolri,LidikSidik/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4,renaksi14*);

- f) sertifikasi profesi anggota Polri serta meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Polair Korpolaairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri;

(*giat .....*)

- (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog6,giat23,renaksi93*);
- g) desentralisasi Pendidikan Pengembangan Spesialisasi untuk fungsi teknis Binmas, Intelijen dan Sabhara ke SPN Polda;  
 (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4,renaksi13*);
- h) pelatihan manajemen operasional Polsek yang *Worldclass Standar*;  
 (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4,renaksi14*);
- 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK), SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polri;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker;  
 (*giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP5d/PPKprog2,giat3,renaksi6, 7*);
- b) pengembangan struktur organisasi Polri di tingkat Satuan Kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3;  
 (*giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP5d/PPKprog1,giat1,2,renaksi2,3,4*);
- c) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker guna pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;  
 (*giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP5d/PPKprog2,giat3,renaksi6, 7*);
- d) melanjutkan penyusunan manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif;  
 (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3,giat5,renaksi18*);
- e) melanjutkan penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;  
 (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3,giat5,renaksi21*);
- 3) meningkatkan .....

- 3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*);  
(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3, giat4,renaksi8,9*);
  - b) melaksanakan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;  
(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3, giat4,renaksi11*);
  - c) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;  
(*giat3104/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3, giat5,renaksi21*);
  - d) meningkatkan kemampuan/skill Bhabinkamtibmas dan pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial secara humanis yang terjadi dimasyarakat dibidang kamtibmas;  
(*giat3100,5076/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtibmas/ SP3/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4,renaksi16*);
- 4) meningkatkan perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan perintisan kerjasama pendidikan Dagri dan Lugri;  
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3, giat6,renaksi24*);
  - b) melaksanakan perpanjangan MoU kermadik Dagri dan Lugri;  
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3, giat6,renaksi24,25*);
  - c) Kerjasama dengan Lembaga/Asosiasi sertifikasi dalam dan luar negeri;

(*giat .....*

- (*giat3100,3120,3122/progProfesionalismeSDMPolri,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat6,renaksi24,25*);
- d) menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan CAT (*Computer Asisted Test*) ditingkat Polda;  
 (*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3,giat4,renaksi8,9*);
- 5) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mempercepat pembangunan SDM orang asli Papua:  
 (*giat3100,3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS4/IKP3a/PPKprog3,giat4,renaksi9,14*);
- b) melanjutkan pengembangan Aplikasi Sirena secara bertahap agar lebih aplikatif;  
 (*giat3084,4339/progAlmatsusSarprasPolri,Dukma/SP4/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat9,renaksi33,34*);
- c) melanjutkan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi baik *hardware* maupun *software* untuk mendukung aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting*;  
 (*giat3084/prog2/SP4/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat9,renaksi33,34*);
- d) pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri melalui LPSE sesuai peraturan yang berlaku;  
 (*giat4341/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2/SP4/SS4/IKP4d/PPKprog3,giat4,renaksi11,14*);
- e) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;  
 (*giat3100,4341/progProfesionalismeSDM,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3,giat4,renaksi13,14*);
- f) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri;

(*giat .....*)

(giat3072,3100/progDukma,ProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKP3a/  
 PPKprog3,giat4,renaksi11,14);

- 6) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “sistem reward and punishment”;  
 (giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3, giat5,renaksi23);
  - b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (*kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik*) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;  
 (giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3, giat5,renaksi22);
  - c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP;  
 (giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPK prog3,giat5,renaksi18,20,21);
  - d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;  
 (giat3100,3108,5076/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtibmas/SP4/ SS3/IKP3a/PPKprog3,giat4,ren aksi13);
- 7) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama;  
 (giat3072/progDukma/SP4/SS5/IKP5e/PPKprog3,giat8,renaksi 30,31,32);
  - b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas;  
 (giat .....



(*giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP5e/PPKprog3,giat8,renaksi32*);

- c) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai pada Polri berkaitan dengan ASABRI;

(*giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP5e/PPKprog3,giat8,renaksi29*);

- d) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;

(*giat3072,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS3/IKP5e/PPKprog3,giat8,renaksi 30,31*);

- e) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS);

(*giat3072,5062/progDukma,progAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog4,giat10,renaksi31,103*);

- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern**”, yaitu:

- 1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online*;

(*giat5062,3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progDukma/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat9,10,renaksi 34,39,40*);

- b) pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;

(*giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,11,giat9,10,37,40,ren aksi34,37,38,135,144*);

c. pemenuhan .....

- c) pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;  
*(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog11,giat40,renaksi141);*
- d) melaksanakan dan mengembangkan Pembangunan Indonesia *Safety Driving Center*;  
*(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,12,giat10,41,renaksi38,145);*
- e) melanjutkan pembangunan RTMC/TMC;  
*(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2,progHarkamtibmas/SP5/SS4b/IKP4b/PPKprog4,12,giat10,41,renaksi38,145);*
- f) melanjutkan pembangunan/pemasangan *e-TLE* guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya;  
*(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog6,giat23,renaksi91);*
- g) pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;  
*(giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog3,giat8,renaksi30,31);*
- h) pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan injurensi;  
*(giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat10,renaksi37);*
- i) melanjutkan pembangunan gedung BPKB dan STNK *online*;  
*(giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog11,giat40,renaksi141);*
- j) pembuatan *prototype* peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;

*(giat .....*

- (*giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b//PPKprog4,giat10,renaksi39,42*);
- k) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri serta jaringan Palapa Ring dari Kemenkominfo untuk koneksi Polda-Mabes;  
 (*giat5060,3071/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4d/PPKprog4,giat9,renaksi34*);
- l) membangun sistem komunikasi perbatasan dan Pulau Terluar;  
 (*giat5055,5060,3084/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,renaksi34,37,38*);
- m) melanjutkan pengembangan 110;  
 (*giat3084,5055,5067/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4a/PPKprog4,giat9,renaksi36*);
- n) mengoptimalkan Binmas *online* sistem yang berkoneksi dengan *online single submission* dalam penerbitan surat izin opsional BUJP;  
 (*giat5060,3084,3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog5,giat14,renaksi54*);
- o) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);  
 (*giat5060,5051/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat10,renaksi37,38*);
- p) pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah.  
 (*giat5060,3084/prog2/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat10,renaksi37,38*);
- 2) meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan kerjasama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan *prototype*, berikut melakukan Standarisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;

(*giat .....*)

- (*giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4b/IKP4/PPKprog5,giat20,renaksi41,78*);
- b) menggunakan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri;  
 (*giat4341/prog2/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog5, giat20,renaksi78*);
- 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi personil Polri;  
 (*giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8,renaksi29*);
- b) melanjutkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang dekat personil dan masyarakat guna mendukung “Reformasi Sistem Kesehatan Nasional”;  
 (*giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolriSP5/SS4/IKP4b/PPKprog3,giat8,renaksi31*);
- c) melanjutkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin guna mempercepat pembangunan di Wilayah Perbatasan secara selektif prioritas dan berkelanjutan.  
 (*giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,5,giat10,12,renaksi38,48*);
- 4) melanjutkan pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:  
 melanjutkan pengembangan pembangunan laboratorium forensik beserta rumah dinas di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana di bidang penegakan hukum;  
 (*giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat10,Renaksi38*);
- 5) meningkatkan .....

- 5) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:  
melengkapi peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini;  
*(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPK prog4,giat10,Renaksi39);*
- 6) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengadaan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;  
*(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4a,giat9,renaksi34);*
- b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;  
*(giat5055,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS1,4/IKP4a/PPKprog4a,giat9,renaksi36);*
- c) mengembangkan teknologi kepolisian berdasarkan hasil penelitian;  
*(giat3084,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4c,giat11,renaksi41,42);*
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penguatan Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**, yaitu:
- 1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;

*(giat .....*

- (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5g/PPKprog12,giat42,Renaksi150*);
- b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;  
(*giat3091,3120/progDukma,progHarkamtibmas/SP6/SS5/IKP5g/PPKprog15,giat50,Renaksi174*);
- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal*;  
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5g/PPKprog15,giat49,Renaksi172*);
- d) pemasangan perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan serta terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan Publik;  
(*giat3091/progDukma/SP6/SS4,5/IKP4b/PPKprog15,giat50Renaksi175*);
- 2) mengoptimalkan Saber Pungli di lingkungan internal Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli;  
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5g/PPK/PPKprog15,giat48Renaksi169*);
- b) membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara Satgas dan UPP;  
(*giat3091/progDukma/SP6/SS4/IKP4b/PPKprog15,giat48,Renaksi,168,169*);
- c) meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah pungli;  
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5e/PPKprog15,giat49Renaksi170,172*);
- d) pelaksanaan pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS;

(*giat .....*)

- (*giat3089,3090/prog5/SP6/SS5/IKU5g/PPKprog15,giat48,Renaksi 168,169*);
- e) pelaksanaan pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, SESPIMA, SESPIMMEN/PKN Tingkat 2, SESPIMTI/LEMHANAS dan PKN Tingkat 1;  
*(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKU5g/PPKprog15,giat,48 Renaksi168,169)*;
- f) pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK);  
*(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKU5g/PPKprog16,giat51, Renaksi 176, 177)*;
- g) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri;  
*(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5g/PPKprog15,giat48,Renaksi169)*;
- 3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;  
*(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog15,giat 49,Renaksi170,173)*;
- b) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;  
*(giat3068,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5b/PPKprog15,giat48,Renaksi 168,169)*;
- c) melanjutkan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(*giat .....*

*(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog14,giat47,Renaksi165);*

- 4) meningkatkan tatakelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengembangkan aplikasi *e-Jakstra* terkait perencanaan dan penganggaran Polri;  
*(giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP5f/PPKprog4,giat10,Renaksi38,39);*
  - b) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien;  
*(giat4339/progDukma/SP6/SS5/IKP5f/PPKprog15,giat48,Renaksi168,175);*
  - c) meningkatkan sinergitas dalam *e-Jakstra* guna menyusun produk perencanaan Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) guna menyelaraskan pembangunan di Polri agar semakin berkualitas;  
*(giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP5f/PPKprog14,giat47,Renaksi163);*
  - d) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tatakelola keuangan tingkat Satker;  
*(giat3068,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5c/PPKprog15,giat48,Renaksi168);*
  - e) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;  
*(giat3068,4339,3091/prog1/SP6/SS5/IKP5f/PPKprog14,giat47,Renaksi163);*
  - f) melaksanakan .....



- f) melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kinerja dan anggaran baik di bidang Pembinaan dan Operasional;  
*(giat3068,4339,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5f/PPKprog14, giat47,Renaksi162);*
- 5) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);  
*(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog1,giat1,Renaksi1,2);*
- b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya termasuk pengembangan wilayah Papua;  
*(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog1,giat1,Renaksi3);*
- c) melanjutkan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Mabes Polri;  
*(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP5d/PPKprog1,giat2,Renaksi4,5);*
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;

*(giat .....*

*(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog11,giat38,Ren aksi 139,140);*

- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes dan Polres Metro, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;

*(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog11,giat138,Renaksi140);*

- c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;

*(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog11,giat38,Renaksi 136,139,140);*

- d) mempertahankan capaian satker/satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

*(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog11,giat39,Renaksi140);*

- e) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan satker Polda;

*(giat5053/progDukma/SS5/IKP5d/PPKprog11,12,giat39,41,Ren aksi146).*

2. Arah .....

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng Tahun 2023.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Jateng Tahun 2023, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Memantapkan kinerja harkamtibmas guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Jawa Tengah”**, yaitu:

- 1) meningkatkan peran Polri dalam menjaga keamanan Jawa Tengah melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) memetakan *potensi kerawanan Pemilu serentak*, potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan situasi gangguan Kamtibmas lainnya;  
 (*giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131*);
  - b) melakukan Lidik pamgal dengan fokus pada *potensi kerawanan Pemilu serentak*, potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;  
 (*giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131*);
  - b) mendukung pelaksanaan penelitian dan survei terhadap persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya;  
 (*giat5067/progDukma/SP1/SS1/IKU1/PPKprog4,giat11,renaksi41,42,43*);
- 2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan kamtibmas dan terorisme di Jawa Tengah melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;  
 (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,14,renaksi51,55*);

b) meningkatkan .....

- b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi;  
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi65*);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasila untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;  
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,15,renaksi46,47,56,57,59*);
- d) menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik sektarian yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme;  
(*giat3112,3117/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi60,61*);
- e) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media *online* dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris;  
(*giat5056/progDukman/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi6*);
- f) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam mendukung penanganan kasus terorisme;  
(*giat3117/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi6*);
- g) melaksanakan identifikasi dan penggalangan terhadap individu atau kelompok mantan narapidana terorisme dan keluarganya;  
(*giat3117/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi65*);
- h) menetralsir dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas;  
(*giat3149/progDukma/SP1/SS1/IKU1/PPKprog13,giat43,renaksi151,152*);
- i) melaksanakan .....

- i) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;  
 (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi 46,51);
  - j) meningkatkan kegiatan Patroli daerah rawan Kejahatan;  
 (giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi 48);
  - k) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan;  
 (giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi 48);
  - l) meningkatkan kegiatan Patroli dan pengamanan di tempat obvit/ obvitnas dan tempat pariwisata;  
 (giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi 50);
- 3) meningkatkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka Harkamtibmas untuk mendukung penanganan Covid-19 saat "*New Normal*" dengan melibatkan peran aktif masyarakat Jawa Tengah; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP, Satpam dan Polsus;  
 (Giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat21,renaksi79,80)
  - b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan program "*kampung tangguh*" dan asistensi penguatan KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri);  
 (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi46,47,51);
  - c) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas;  
 (giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,6,giat12,23,renaksi49,91);
- 4) melaksanakan .....

- 4) melaksanakan penanganan konflik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah secara humanis;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;  
*(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi60,64,65);*
  - b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;  
*(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat14,renaksi54,55);*
- 5) meningkatkan Kamseltibcarlantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli;  
*(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi49);*
  - b) meningkatkan kegiatan patroli daerah rawan kejahatan saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;  
*(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27,28,renaksi49,107,112);*
  - c) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat obvit/obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung *PEN* (Pemulihan Ekonomi Nasional) serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;  
*(giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27,renaksi49,50,107);*
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa dan bencana;

untuk .....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) personel Brimob Polda Jawa Tengah yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan *stakeholders* dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah;  
*(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,32renaksi74,78,129);*
  - b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Samapta, Brimob dan bantuan Satwa;  
*(giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,32renaksi74,78,129);*
  - c) memetakan wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;  
*(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9,giat30,renaksi123);*
  - d) bekerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan gempa dan bencana;  
*(giat3072,5076/progDukma,Harkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat32,renaksi31,129);*
- 7) mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan *event* nasional/internasional serta pembangunan ibukota negara baru tahun 2023;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta mengoptimalkan kekuatan Brimob dan fungsi kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan IKN serta saat berlangsungnya *event* nasional/internasional;

*(giat .....*

- (*giat5079,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi73,116*);
- b) mendukung pelaksanaan pengamanan *Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR) di Bali;  
 (*giat5079,3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi73*);
- c) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada *event* nasional/internasional tahun 2023;  
 (*giat3130,3133,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi73*);
- d) mendukung pengamanan pembangunan ibukota negara baru (IKN) di Kalimantan;  
 (*giat3130,3133,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9,giat30,renaksi116*);
- 8) Meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mendukung kesiapan personel Polda Jawa Tengah untuk mampu digerakan secara cepat dalam rangka pengamanan Ibu Kota Negara baru;  
 (*giat3130,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9giat30,renaksi116*);
- b) melaksanakan dan mengkoordinasikan Kontijensi dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik, bencana dan ancaman terorisme;  
 (*giat3128,3130,5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog10,giat17,renaksi66*);
- c) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi;

(*giat .....*



- (*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat17,renaksi 69*);
- d) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif;  
 (*giat5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,ren aksi74,78*);
- e) melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat Jawa Tengah;  
 (*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,renaksi74,78*);
- f) tergelarnya personel Polri dikawasan obvitnas, objek tertentu dan objek pariwisata;  
 (*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,renaksi50*);
- g) melaksanakan pelayanan unit Satwa dalam kegiatan pelacakan dan penangkalan tindak kejahatan;  
 (*giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,30,renaksi50,120*);
- h) memperkuat Binmas *Online System* (BOS) dengan melibatkan peran Bhabinkamtibmas;  
 (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat14,renaksi 54,55*);
- 9) meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan Kerjasama antara Polri dan Kementrian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi polisional;  
 (*giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat20,renaksi 78*);

b) mendukung .....

- b) mendukung Kerjasama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerjasama Bilateral dan Multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra Polri/Indonesia di mata Internasional;  
*(giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat20,renaksi 78);*
- c) mendukung Kerjasama keamanan dan ketertiban internasional diwilayah perbatasan;  
*(giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat20,renaksi 78);*
- d) mendukung kerjasama dengan BNPT dalam menjalankan program kontra radikalisme, kontra ideologi, kontra propaganda dan moderasi beragama;  
*(giat3120,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,Renaksi62);*
- 10) meningkatkan penggelaran patroli kapal Polri di wilayah perairan Jawa Tengah guna mendukung terlaksananya pengamanan laut; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:  
 patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;  
*(giat3134,4342/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi48);*
- 11) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan operasi kepolisian;  
*(giat5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi 70);*
- b) penggelaran pasukan fungsi Sabhara;  
*(giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70);*
- c) penyelenggaraan .....

- c) penyelenggaraan pengamanan objek vital;  
*(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70);*
  - d) penanggulangan keamanan dalam negeri;  
*(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70);*
  - e) penindakan tindak pidana umum;  
*(giat3142/progLidikSidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi7);*
- 12) meningkatkan penguatan Polri di wilayah keamanan pulau terluar berpenghuni;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) membangun kemampuan operasional Brimob Polda Jawa Tengah dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi di wilayah pulau terluar berpenghuni;  
*(giat,3130,5087,3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi48,50);*
  - b) meningkatkan kegiatan patroli daerah rawan kejahatan, obvit/obvitnas dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan pulau terluar berpenghuni;  
*(giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi48);*
  - c) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan pulau terluar berpenghuni;  
*(giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi48);*
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polda Jawa Tengah”**, yaitu:
- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;

untuk .....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. mendukung peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta Pelayanan Keliling di Bidang Lalu Lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan Identifikasi sebagai alat kontrol dan data Forensik Kepolisian;  
 (*giat3133,3141/progHarkamtibmas/SP2/SS2/IKU1,IKP4/PPKprog5,11,giat9,10,37,40,renaksi33,37,38,135,141,142,144*);
  - b. meningkatkan pengembangan Registrasi dan Identifikasi dengan memberikan jaminan Legitimasi atas kemampuan Pengemudi dan kendaraan bermotor;  
 (*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/PPKprog5,11,giat9,10,37,40,renaksi33,37,38,135,141,142,144*);
  - c. mendukung inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal dilokasi *afirmatif* (menguatkan) di pulau terluar berpenghuni;  
 (*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP5/PPKprog11,giat37,38,renaksi135,136,137,139*);
- 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK *online*, SIM dan STNK;  
 (*giat3128,3133/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP5/PPKprog11,giat40,renaksi141,142,144*);
  - b. melakukan *survey* kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Urkes jajarannya;  
 (*giat3072/progDukma/SP2/SS5/IKP5e/PPKprog3,giat8,renaksi31*);
  - c. mendukung pengoptimalan operator (*Out Sourcing*) untuk *Helpdesk Support* aplikasi *Binmas Online System* (BOS);  
 (*giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP5/PPKprog5,giat14renaksi54,55*);
  - d. meningkatkan .....

- d. meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan Intelkam Polri melalui layanan *drivethru* perpanjangan SKCK dan layanan SKCK delivery di 35 Polres Jajaran;  
(*giat3084,3133/progAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4b/PPKprog11,giat40,renaksi141,144*);
- 3) meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang *online* dan humanis serta berbasis TIK;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang terintegrasi secara online;  
(*giat5051/progDukma/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renaksi39,40*);
- b. menyusun standar pembangunan SPKT online dan RPK sesuai SPM;  
(*giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renaksi38*);
- 4) mengoptimalkan *quick response* Kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengkajian terhadap aturan/SOP pelayanan publik yang berbelit-belit;  
(*giat4340/progDukma/SP2/SS5/IKP11/PPKprog11,giat38,renaksi139*);
- b) mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;  
(*giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/PPKprog9,giat32,renaksi123*);
- c) mendukung peningkatan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan obyek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit;  
(*giat3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27,renaksi50,107*);

d. mengelola .....

- d) mengelola kegiatan *respon time* di Samapta Polda Jateng dan kewilayahan;  
(*giat3130/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/PPKprog5,9,giat12,3,renaksi 48,117*);
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan hukum di Polda Jawa Tengah yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik”**, yaitu:
- 1) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik dan PPNS di wilayah perairan Jawa Tengah;  
(*giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi84*);
- b) meningkatkan pemberantasan 4(empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba (TPPU), Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;  
(*giat3140,3142,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi85,86,87,88,94,95,98*);
- c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);  
(*giat3145/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi86*);
- d) melaksanakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan.  
(*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,Renaksi8*);
- e) penanganan kejahatan pada ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat.

(*giat .....*)

- (*giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi88*);
- f) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring;  
 (*giat3130,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi92,93*);
- g) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;  
 (*giat3141,3140,3142,3144,3145,3146,3151,4342,4343/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,Renaksi89,90*);
- h) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti.  
 (*giat3140,3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi96*);
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik di Polda Jawa Tengah guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polda Jawa Tengah dan Jajaran;  
 (*giat3137/progLidikSidik/SP3/SS3/IKP1/PPKprog6,giat23,renaksi93*);
- b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP;  
 (*giat3140,3141/progLidikSidik/SP3/SS3/IKP2/PPKprog6,giat23,renaksi93,96*);
- 3) mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan .....

penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;

(*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog16,giat51renaksi176,177*);

- b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran Birowassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog14,giat47,renaksi162,163*);

- c) mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan dan transparansi;

(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi97*);

- 4) mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mendukung pengintegrasian *database* kriminalitas dari seluruh satker di lingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya;

(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi100*);

- b) mendukung standarisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*);

(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi99*);

- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Jawa Tengah”**, yaitu:

- 1) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era *police 4.0*;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan penataan kurikulum yang meliputi 70% praktek dan 30% teori pada seluruh pendidikan baik diktuk, dikbang dan dikbangum;

(*giat .....*)



- (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat4,renaksi13,14*);
- b) *upgrading* dan sertifikasi gadik/instruktur;  
 (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat4,renaksi11,13,14*);
- c) pelaksanaan latihan harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator yang *Worldclass Standar*;  
 (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat4, Renaksi14*);
- d) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang "*Worldclass Standar*";  
 (*giat3100,5076,3130,5087/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtibmas/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat4renaksi14,16*);
- e) peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang *Worldclass Standar*;  
 (*giat3100,3151,3141/progProfesionalismeSDMPolri,LidikSidik/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat4,renaksi14*);
- f) sertifikasi profesi anggota Polri serta meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Polairud Polda Jateng serta Lantas Jajaran Polda Jateng;  
 (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog6,giat23,renaksi93*);
- g) desentralisasi Pendidikan Pengembangan Spesialisasi untuk fungsi teknis Binmas, Intelijen dan Sabhara ke SPN Polda Jateng;  
 (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat4,renaksi13*);
- h) pelatihan manajemen operasional Polsek yang *Worldclass Standar*;  
 (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat4,renaksi14*);
- 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK), SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polri;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) mengoptimalkan .....

- a) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker;  
*(giat3073/progDukma/SP4/SS3/IKP1/PPKprog2,giat3,renaksi6,7);*
  - b) pengembangan struktur organisasi Polri di tingkat Satuan Kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3;  
*(giat3073/progDukma/SP4/SS5/IKP10/PPKprog1,giat1,2,renaksi2,3,4)*
  - c) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker guna pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;  
*(giat3073/progDukma/SP4/SS5/IKP10/PPKprog2,giat3,renaksi6,7);*
  - d) melanjutkan penyusunan manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif;  
*(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,renaksi18);*
  - e) melanjutkan penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;  
*(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,renaksi21);*
- 3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*);  
*(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksi8,9);*
  - b) melaksanakan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;  
*(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksi11);*
  - c) melakukan .....

- c) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;  
*(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,renaksi21);*
- d) meningkatkan kemampuan/skill Bhabinkamtibmas dan pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial secara humanis yang terjadi dimasyarakat dibidang kamtibmas;  
*(giat3100,5076/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtibmas/SP3/SS3/IKP2/PPKprog3,giat4,renaksi16);*
- 4) meningkatkan perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Mendukung pelaksanaan kerjasama program beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri;  
*(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat6,renaksi24)*
- b) Mendukung pelaksanaan perpanjangan MoU pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi di wilayah Polda Jateng;  
*(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat6,renaksi24,25);*
- c) menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan CAT (*Computer Asisted Test*) ditingkat Polda;  
*(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksi8,9);*
- 8) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mendukung percepatan pembangunan SDM orang asli Papua:

*(giat .....*

- (*giat3100,3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat4,renaksi9,14*);
- b) mendukung pengembangan Aplikasi Sirena secara bertahap agar lebih aplikatif;  
 (*giat3073/progDukma/SP4/SS4/IKP5/PPKprog4,giat9,renaksi33,34*);
- c) melanjutkan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi baik *hardware* maupun *software* untuk mendukung aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting*;  
 (*giat30734/prog2/SP4/SS4/IKP5/PPKprog4,giat9,renaksi33,34*);
- d) pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri melalui LPSE sesuai peraturan yang berlaku;  
 (*giat5059/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2/SP4/SS4/IKP2/PPKprog3,giat4,renaksi11,14*);
- e) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;  
 (*giat5059/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksi13,14*);
- f) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel Bidokkes Polda Jateng dan jajaran;  
 (*giat3072/progDukma/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat4,renaksi11,14*);  
*dokkes*
- 9) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan "*sistem reward and punishment*";  
 (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,renaksi23*);
- b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (*kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik*) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung "*program manajemen talenta*";

(*giat* .....

- (giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,renaksi22);*
- c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP;  
*(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,renaksi18,20,21);*
- d) mengusulkan peserta assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;  
*(giat5076/progHarkamtibmas/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksi13);*
- 10) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkesta;  
*(giat3072/progDukma/SP4/SS5/IKP11/PPKprog3,giat8,renaksi30,31,32);*
- b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas;  
*(giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat8,renaksi29);*
- c) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai pada Polri berkaitan dengan ASABRI;  
*(giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat8,renaksi29);*
- d) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, di Biddokkes dan jajaran (Poliklinik) Polda Jateng untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;  
*(giat3072,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS5/IKP11/PPKprog3,giat8,renaksi30,31);*
- e) mempertahankan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS);

*(giat .....*

(*giat3072,5062/progDukma,progAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS5/IKP11/PPKprog4,giat10,renaksi31,103*);

e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polda Jawa Tengah yang modern”**, yaitu:

1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polda Jawa Tengah yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) mengusulkan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang terintegrasi secara *online*;

(*giat5062,5059,3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progDukma/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,10,renaksi 34,39,40*);

b) mengusulkan pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insurgensi dan pemeliharaan keamanan;

(*giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP5/PPKprog4,11,giat9,10,37,40,ren aksi34,37,38,135,144*);

c) mengusulkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;

(*giat3133/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP5/PPKprog11,giat40,renaksi141*);

d) melaksanakan dan mengembangkan Pembangunan Indonesia *Safety Driving Center*;

(*3133/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP5/PPKprog4,12,giat10,41,renaksi38,145*);

e) mendukung kegiatan operasional RTMC (*Regional Traffic Management Center*)/TMC (*Taffic Management Center*);

(*giat .....*)

- (*giat3133/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP5/PPKprog4,12,giat10,41,renaksi38,145*);
- f) melanjutkan program pemasangan *e-TLE* guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya;  
 (*giat3133/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP5/PPKprog6,giat23,renaksi91*);
- g) melanjutkan pembangunan gedung BPKB dan STNK *online*;  
 (*giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog11,giat40,renaksi141*);
- h) mengusulkan pembuatan *prototype* peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;  
 (*giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4//PPKprog4,giat10,renaksi39,42*);
- i) mengintegrasikan Sistem Radio Trunking Intranet VPN/IP tingkat Polda ke tingkat Polsek di wilayah Polda Jateng;  
 (*giat3071/progDukmai/SP5/SS4/IKP3/PPKprog4,giat9,renaksi34*);
- j) mengembangkan sistem komunikasi pulau Karimun Jawa dan pulau Nusakambangan yang berbasis pada komunikasi radio dan komunikasi data agar dapat terhubung dengan Polres Jepara dan Polres Cilacap;  
 (*giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP3/PPKprog4,giat9,renaksi34,37,38*);
- k) mendukung kelanjutan pengembangan 110 dengan menjaga kestabilan akses dengan cara memperlebar Bandwidth intranet VPN/IP dimasing2 Polres Jajaran Polda Jateng serta mengupayakan stabilitas catu daya listrik pada server beserta peralatan di ruang Callcenter 110 pada masing2 Polres;  
 (*giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP3/PPKprog4,giat9,renaksi36*);
- l) mengoptimalkan Binmas *online* sistem yang berkoneksi dengan *online singlesubmission* dalam penerbitan surat izin operasional BUJP;  
 (*giat5076/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP5/PPKprog5,giat14,renaksi54*);
- m) mengusulkan .....

- m) mengusulkan hasil pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);  
*(giat5051,3084//progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP5/PPKprog4,giat10,renaksi37,38);*
- n) pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah.  
*(giat5060,3084/prog2/SP5/SS4/IKP5/PPKprog4,giat10,renaksi37,38);*
- 2) meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMN) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mendukung kerjasama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan *prototype*, berikut melakukan Standarisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;  
*(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog5,giat20,renaksi41,78);*
- b) menggunakan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri;  
*(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5/PPKprog5,giat20,renaksi78);*
- 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi personil Polri;  
*(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8,renaksi29);*
- b) mengusulkan dan meningkatkan pembangunan rumah sakit Bhayangkara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, ASN, Keluarga dan masyarakat guna mendukung “*Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*”;

*(giat .....*



- (giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolriSP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8,renakasi31);*
- c) melanjutkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin guna mempercepat pembangunan di Wilayah Pulau Terluar Berpenghuni.  
*(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,5,giat10,12,renaksi38,48);*
- 4) melanjutkan pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:  
 mengusulkan pengembangan pembangunan gedung laboratorium forensik beserta rumah dinas di Polda Jateng dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana di bidang penegakan hukum;  
*(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,Renaksi38);*
- 5) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI (Scientific Crime investigation);  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:  
 melengkapi peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini;  
*(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP5/PPKprog4,giat10,Renaksi39);*
- 6) membangun dan menyatukan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengadaan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;  
*(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP5/PPKprog4a,giat9,renaksi34);*
- b) mendukung .....

- b) mendukung kelanjutan penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* Kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;  
*(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP5/PPKprog4a,giat9,renaksi36);*
- c) mendukung pengembangan teknologi Kepolisian berdasarkan hasil penelitian;  
*(giat3084,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP5/PPKprog4c,giat11,renaksi41,42);*
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penguatan pengawasan yang efektif berbasis T.I guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Polda Jawa Tengah”**, yaitu:
- 1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;  
*(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP13/PPKprog12,giat42,Renaksi150);*
- b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;  
*(giat3073,3091,/progDukma/SP6/SS5/IKP13/PPKprog15,giat50,Renaksi176);*
- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal*;  
*(giat3073,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP13/PPKprog15,giat49,Renaksi172);*
- 2) mengoptimalkan Saber Pungli di lingkungan internal Polri;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan .....

- a) meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP (Unit Pemberantasan Pungli) K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli;  
*(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP14/PPK/PPKprog15,giat48Renaksi169);*
- b) membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara Satgas dan UPP;  
*(giat3091/progDukma/SP6/SS4/IKP5/PPKprog15,giat48,Renaksi,168,169);*
- c) meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah pungli;  
*(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat49Renaksi170,172);*
- d) pelaksanaan pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS;  
*(giat3089,3090,3091/prog5/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat48,Renaksi168,169);*
- e) pelaksanaan pengamanan (Kegiatan,Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, SESPIMA, SESPIMMEN/PKN Tingkat 2, SESPIMTI/LEMHANAS dan PKN Tingkat 1;  
*(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat,48 Renaksi168,169);*
- f) melaksanakan operasi Bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK);  
*(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKU14/PPKprog16,giat51,Renaksi176,177);*
- g) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri;  
*(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat48,Renaksi169);*
- 3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;  
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) meningkatkan .....

- a) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;  
*(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat49,Renaksi170,173);*
- b) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;  
*(giat3068,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP8/PPKprog15,giat48,Renaksi168,169);*
- c) melanjutkan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
*(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP14/PPKprog14,giat47,Renaksi165);*
- 4) meningkatkan tatakelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mendukung pengembangan aplikasi *e-Jakstra* terkait perencanaan dan penganggaran Polri;  
*(giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP12/PPKprog4,giat10,Renaksi38,39);*
- b) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien;  
*(giat3073,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP12/PPKprog15,giat48,Renaksi168,175);*
- c) meningkatkan sinergitas dalam *e-Jakstra* guna menyusun produk perencanaan Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) guna menyelaraskan pembangunan di Polri agar semakin berkualitas;

*(giat .....*

- (*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP7/PPKprog14,giat47,Renaksi163*);
- d) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tatakelola keuangan tingkat Satker;  
(*giat3068,3073,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP9/PPKprog15,giat48,Renaksi168*);
- e) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;  
(*giat3068,3073,4339,3091/prog1/SP6/SS5/IKP12/PPKprog14,giat47,Renaksi163*);
- f) melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kinerja dan anggaran baik di bidang Pembinaan dan Operasional;  
(*giat3068,4339,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP7/PPKprog14,giat47,Renaksi162*);
- 5) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);  
(*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP10/PPKprog1,giat1,Renaksi1,2*);
- b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya;  
(*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP10/PPKprog1,giat1,Renaksi3*);
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Jawa Tengah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;

untuk .....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;  
*(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP11/PPKprog11,giat38,Renaksi139,140);*
- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/Polrestabes, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;  
*(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP11/PPKprog11,giat138,Renaksi140);*
- c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;  
*(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP11/PPKprog11,giat38,Renaksi136,139,140);*
- d) mempertahankan capaian satker/satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;  
*(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP11/PPKprog11,giat39,Renaksi140);*
- e) melaksanakan .....

- e) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polrestabes/Polresta/Polres dan satker Polda;  
(*giat5053/progDukma/SS5/IKP11/PPKprog11,12,giat39,41,Renaksi146*).
3. Program Prioritas Kapolri, Pembangunan Zona Integritas serta *Commander Wish* Kapolda Jateng.
- a. Program Prioritas Kapolri
- 1) penataan kelembagaan;
  - 2) perubahan sistem dan metode organisasi;
  - 3) menjadikan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*;
  - 4) perubahan teknologi Kepolisian *Modern Police 4.0*;
  - 5) pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas;
  - 6) peningkatan kinerja penegakkan hukum;
  - 7) pemantapan dukungan Polri dalam penanganan *Covid-19*;
  - 8) pemulihan ekonomi nasional (PEN);
  - 9) menjamin keamanan Program Prioritas Nasional;
  - 10) penguatan penanganan konflik social;
  - 11) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
  - 12) mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi;
  - 13) pemantapan komunikasi publik;
  - 14) pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
  - 15) penguatan fungsi pengawasan;
  - 16) pengawasan oleh masyarakat (*Public Complaint*).
- b. Zona Integritas
- 1) manajemen Perubahan;
  - 2) penataan Tatalaksana;
  - 3) penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
  - 4) penguatan Pengawasan ;
  - 5) penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - 6) peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

c. *Commander* .....

- c. *Commander Wish* Kapolda Jateng:
- 1) loyalitas tegak lurus kepada pimpinan tertinggi Polri;
  - 2) tingkatkan soliditas 3 pilar plus;
  - 3) antisipasi serangan teror dan rusuh massa;
  - 4) perkuat manajemen media;
  - 5) dukung percepatan penanganan covid-19;
  - 6) mantapkan harkamtibmas jelang pilkada dan pilkades serentak tahun 2020;
  - 7) Polda Jateng “Hadir”.

#### IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF POLDA JATENG T.A. 2023

##### 1. Program dan Kegiatan Polda Jateng

###### a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri;

###### 1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerjasama lintas sektor.

###### 2) Kegiatan:

- a) pelayanan administrasi keuangan Polri;
- b) penerangan masyarakat;
- c) penyelenggaraan teknologi informasi;
- d) pelayanan kesehatan Polri;
- e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- f) pertanggungjawaban profesi;
- g) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
- h) penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
- i) penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;
- j) pengelolaan multimedia;
- k) pemberian bantuan dan nasehat hukum;
- l) kerjasama dan penyuluhan hukum;
- m) penyusunan kebijakan Polri;
- n) reformasi birokrasi Polri;

o) manajemen .....



- o) manajemen anggaran;
  - p) pengelola informasi dan dokumentasi.
- b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
- 1) Tujuan:  
Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.
  - 2) Kegiatan:
    - a) pengembangan peralatan Polri;
    - b) dukungan manajemen dan teknis sarpras;
    - c) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri.
- c. Program Profesionalisme SDM Polri;
- 1) Tujuan:  
Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.
  - 2) Kegiatan:
    - a) dukungan manajemen dan Teknik profesionalisme SDM Polri;
    - b) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri;
    - c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri;
    - d) pembinaan karier personel Polri;
    - e) pelayanan psikologi anggota Polri.
- d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 1) Tujuan:  
Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerjasama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.
  - 2) Kegiatan:
    - a) analisis keamanan;
    - b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
    - c) penyelenggaraan .....

- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
  - d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
  - e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
  - f) kerjasama keamanan dan ketertiban K/L;
  - g) dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - h) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;
  - i) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
  - j) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
  - k) penyelenggaraan Kepolisian Perairan;
  - l) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan Khusus;
  - m) pembinaan potensi keamanan;
  - n) pengendalian operasi Kepolisian;
  - o) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban;
  - p) penanggulangan keamanan dalam negeri.
- e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- 1) Tujuan:  
Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  - 2) Kegiatan:
    - a. dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
    - b. penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
    - c. penyelenggaraan laboratorium forensik;
    - d. penindakan tindak pidana umum;
    - e. penindakan tindak pidana narkoba;
    - f. penindakan tindak pidana ekonomi khusus;
    - g. penindakan .....

- g. penindakan tindak pidana korupsi;
- h. penindakan tindak pidana siber;
- i. penindakan tindak pidana perairan;
- j. penindakan tindak pidana laka lantas;
- k. penindakan tindak pidana tertentu;
- l. koordinasi dan pengawasan PPNS;
- m. pengawasan penyidikan;

2. Pagu Indikatif Polda Jateng T.A. 2023

Pagu Indikatif Polda Jateng Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.977.786.199.000,- (Tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.782.197.201.000,- (Dua triliun tujuh ratus delapan puluh dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah) Belanja Barang Rp. 1.188.539.878.000,- (Satu triliun seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Belanja Modal Rp. 7.049.120.000,- (tujuh milyar empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri Rp. 2.595.837.392.000,- (Dua triliun lima ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) meliputi kegiatan:
    - 1) pelayanan administrasi keuangan Polri Rp.878.527.000,-
    - 2) penerangan masyarakat Rp. 5.847.185.000,-
    - 3) penyelenggaraan teknologi informasi Rp. 161.815.000,-
    - 4) pelayanan kesehatan Polri Rp. 81.379.659.000,-
    - 5) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp. 2.494.781.372.000,-
    - 6) pertanggungjawaban profesi Rp. 480.551.000,-
    - 7) penyelenggaraan pengamanan internal Polri Rp. 1.438.180.000,-
    - 8) penegakan tata tertib dan disiplin Polri Rp. 1.877.024.000,-
    - 9) penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan Rp. 3.923.169.000,-
    - 10) pengelolaan multimedia Rp. 25.489.000,-
    - 11) pemberian bantuan dan nasehat hukum Rp. 970.056.000,-
    - 12) penyusunan dan penyuluhan hukum Rp. 770.000.000,-
- 1) penyusunan .....

- 13) penyusunan kebijakan strategi Polri Rp. 336.132.000,-
  - 14) reformasi birokrasi Polri Rp. 1.311.589.000,-
  - 15) manajemen anggaran Rp. 1.462.644.000,-
  - 16) pengelola informasi dan dokumentasi Rp. 194.000.000,-
- b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp. 415.388.929.000,- (Empat ratus lima belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) meliputi kegiatan:
- 1) pengembangan peralatan Polri Rp. 1.549.120.000,-
  - 2) dukungan manajemen dan teknis sarpras Rp. 408.339.809.000,-
  - 3) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri Rp. 5.500.000.000,-
- c. Program Profesional Sumber Daya Manusia Polri Rp. 49.780.534.000,- (Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) meliputi kegiatan:
- 1) dukungan manajemen dan teknis profesionalisme SDM Polri Rp. 48.035.259.000,-
  - 2) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri Rp. 89.175.000,-
  - 3) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri Rp. 1.303.100.000,-
  - 4) pembinaan karier personel polri Rp. 130.000.000,-
  - 5) pelayanan psikologi anggota Polri Rp. 223.000.000,-
- d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 696.488.028.000,- (Enam ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua puluh delapan ribu rupiah) meliputi kegiatan:
- 1) analisis keamanan Rp. 1.269.618.000,-
  - 2) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Rp. 14.962.011.000,-
  - 3) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Rp. 13.658.038.000,-
  - 4) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya Rp.14.037.787.000,-
  - 5) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara Rp. 16.446.437.000,-
  - 6) kerjasama Keamanan dan Ketertiban K/L Rp. 90.310.000,-
  - 7) dukungan .....

- 7) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 391.914.445.000,-
  - 8) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara Rp. 33.871.581.000,-
  - 9) penyelenggaraan pengamanan objek vital Rp. 21.977.262.000,-
  - 10) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas Rp. 46.076.708.000,-
  - 11) penyelenggaraan Kepolisian Perairan Rp. 401.444.000,-
  - 12) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan Khusus Rp. 3.610.471.000,-
  - 13) pembinaan potensi keamanan Rp. 92.175.298.000,-
  - 14) pengendalian operasi Kepolisian Rp. 41.148.528.000,-
  - 15) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban Rp. 4.349.655.000,-
  - 16) penanggulangan keamanan dalam negeri Rp. 498.435.000,-
- e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 220.291.316.000,- (Dua ratus dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) meliputi kegiatan:
- 1) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 64.667.331.000,-
  - 2) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 679.050.000,-
  - 3) penyelenggaraan laboratorium forensik Rp. 5.157.242.000,-
  - 4) penindakan tindak pidana umum Rp. 88.138.515.000,-
  - 5) penindakan tindak pidana narkoba Rp. 31.817.842.000,-
  - 6) penindakan tindak pidana ekonomi khusus Rp. 1.304.956.000,-
  - 7) penindakan tindak pidana korupsi Rp. 20.554.150.000,-
  - 8) penindakan tindak pidana siber Rp. 1.870.811.000,-
  - 9) penindakan tindak pidana perairan Rp. 534.047.000,-
  - 10) penindakan tindak pidana laka lantas Rp. 3.301.625.000,-
  - 11) penindakan tindak pidana tertentu Rp. 1.329.467.000,-
  - 12) koordinasi dan pengawasan PPNS Rp. 541.200.000,-
  - 13) pengawasan penyidikan Rp. 395.280.000,-

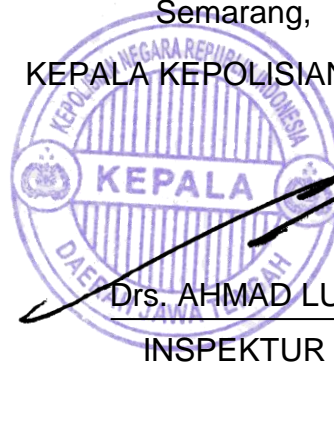
V. PENUTUP .....

## V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2023 di jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Semarang, 29 Juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

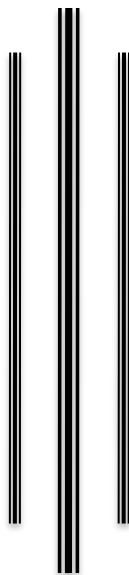


Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI



**LAMPIRAN I :  
RENCANA KERJA TAHUNAN  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**SEMARANG, 29 JUNI 2022**

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA /PENDUKUNG	TARGET	KET
1	2	3	4	5
	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jawa Tengah	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jawa Tengah	4,60	SASARAN IMPACT
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Jawa Tengah	Indeks Harkamtibmas	90,26	
2.	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	Indeks Gakkum	94,31	
3.	Profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah	a. Indeks Profesionalitas SDM Polda Jateng	61,50	
		b. Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Jateng	71,34	
4.	Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah	a. Persentase Pemenuhan Alkom Siap Operasional	66,07%	
		b. Persentase Pemenuhan Pembangunan di Jajaran Polda Jateng	74,07%	
		c. Modernisasi Sarana dan Prasarana Sesuai Teknologi Terkini	71,32%	
		d. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data	3,50	
5.	Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polda Jawa Tengah	a. Nilai AKIP	78,45	
		b. Level Kapabilitas APIP	Level 3	
		c. Penyajian Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	
		d. Capaian Reformasi Birokrasi	75,14	
		e. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	96,36	
		f. Nilai Kinerja Anggaran	92,21	
		g. Presentase penanganan pengaduan masyarakat	92,82%	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA /PENDUKUNG	TARGET	KET
1	2	3	4	5
		h. Presentase Penyelesaian masalah Hukum yang dihadapi Polri	93,68%	

Semarang, 29 Juni 2022

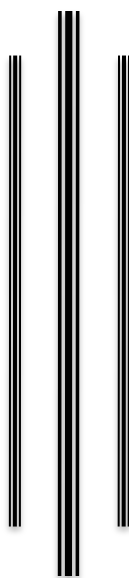
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



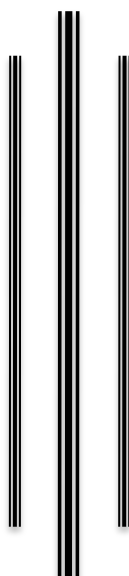
**LAMPIRAN II :**  
**RENCANA KERJA**  
**KEMENTERIAN/LEMBAGA VERSI BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



**SEMARANG, 29 JUNI 2022**



**FORMULIR 1:  
RENCANA KERJA  
KEMENTERIAN/LEMBAGA VERSI BAPPENAS  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**SEMARANG, 29 JUNI 2022**

**FORMULIR 1**  
**PENJELASAN UMUM**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Kementerian/Lembaga : **KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

2. VISI : **Terwujudnya Jawa Tengah Yang Aman dan Tertib**

3. MISI : 1. **Melindungi;**  
 2. **Mengayomi;**  
 3. **Melayani.**

**4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L**


NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2023	Alokasi 2023
01	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Jawa Tengah			
		Indeks Harkamtibmas	86,36	
02	Pengakuan Hukum Secara Berkeadilan			
		Indeks Gakkum	86,41	
03	Profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah			
		Indeks Profesionalitas SDM Polda Jateng	37,74	
		Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Jateng	56,84	
04	Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah			
		Persentase Pemenuhan Alkom Siap Operasional	77,44%	
		Persentase Pemenuhan Pembangunan di Jajaran Polda Jateng	74,07%	
		Modernisasi Sarana dan Prasarana Sesuai Teknologi Terkini	93,83	
		Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data	45,16	
05	Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polda Jawa Tengah			
		Nilai AKIP	73,00	
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	
		Penyajian Laporan Keuangan	2	
		Nilai Reformasi Birokrasi	89,30	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	96,36	
		Nilai Kinerja Anggaran	96,21	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	79,29%	
		Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri	98,34%	
<b>Jumlah</b>				<b>3.977.786.199.000</b>

## 5. Program dan Pendanaan

	Program	Indikasi Pendanaan Tahun 2023				Prakiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026
01	Program Dukungan Manajemen	2.541.061.492.000	0.0	54.775.900.000	0.0	2.595.837.392.000	2.855.421.131.200	2.855.421.131.200	3.140.963.244.320
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	369.173.497.000	0.0	46.215.432.000	0.0	415.388.929.000	456.927.821.900	456.927.821.900	502.620.604.090
03	Program Profesionalisme SDM Polri	49.780.534.000	0.0	0.0	0.0	49.780.534.000	54.758.587.400	54.758.587.400	60.234.446.140
04	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	585.405.566.000	0.0	111.082.462.000	0.0	696.488.028.000	766.136.830.800	766.136.830.800	842.750.513.880
05	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	216.989.691.000	0.0	3.301.625.000	0.0	220.291.316.000	242.320.447.600	242.320.447.600	<b>266.552.492.360</b>
<b>Jumlah</b>		<b>3.762.410.780.000</b>	<b>0.0</b>	<b>215.375.419.000</b>	<b>0.0</b>	<b>3.977.786.199.000</b>	<b>4.375.564.818.900</b>	<b>4.375.564.818.900</b>	<b>4.813.121.300.90</b>

Semarang, 29 Juni 2022

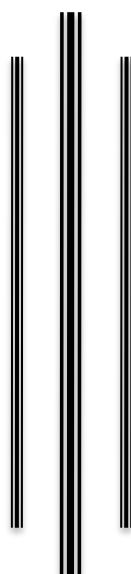
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH


  
 Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI



**FORMULIR 2:**  
**RENCANA KERJA**  
**KEMENTERIAN/LEMBAGA VERSI BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



**SEMARANG, 29 JUNI 2022**

## FORMULIR 2

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

#### TAHUN ANGGARAN 2023

- 1. Kementerian/Lembaga** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
**2. Sasaran Strategis** : Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polda Jawa Tengah  
**3. Program** : Program Dukungan Manajemen  
**4. Unit Organisasi** : Kepolisian Daerah Jawa Tengah  
**5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2023	Alokasi 2023
01	Terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan.		2.595.837.392.000
01.01	Persentase pemenuhan layanan internal yang berkualitas		
Total			2.595.837.392.000

#### 6. Output Program dan Indikator Output Program

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2023	Alokasi 2023
01	Layanan kepada Internal Polri		2.595.837.392.000
01.01	Jumlah layanan yang diberikan sesuai SOP		
Total			2.595.837.392.000

#### 7. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2023				Prakiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	758.527.000	0,0	120.000.000	0,0	878.527.000	966.379.700	1.063.017.670	1.169.319.437
3070	Penerangan Masyarakat	5.847.185.000	0,0	0,0	0,0	5.847.185.000	6.431.903.500	7.075.093.850	7.782.603.235
3071	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	161.815.000	0,0	0,0	0,0	161.815.000	177.996.500	195.796.150	215.375.765
3072	Pelayanan Kesehatan Polri	26.963.759.000	0,0	54.415.900.000	0,0	81.379.659.000	89.517.624.900	98.469.387.390	108.316.326.129

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2023					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	2.494.661.372.000	0.0	120.000.000	0.0	2.494.781.372.000	2.744.259.509.200	3.018.685.460.120	3.320.554.006.132
3088	Pertanggungjawaban Profesi	480.551.000	0.0	0.0	0.0	480.551.000	528.606.100	581.466.710	639.613.381
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	1.438.180.000	0.0	0.0	0.0	1.438.180.000	1.581.998.000	1.740.197.800	1.914.217.580
3090	Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri	1.877.024.000	0.0	0.0	0.0	1.877.024.000	2.064.726.400	2.271.199.040	2.498.318.944
3091	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	3.923.169.000	0.0	0.0	0.0	3.923.169.000	4.315.485.900	4.747.034.490	5.221.737.939
3149	Pengelolaan Multimedia	25.489.000	0.0	0.0	0.0	25.489.000	28.037.900	30.841.690	33.925.859
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	970.056.000	0.0	0.0	0.0	970.056.000	1.067.061.600	1.173.767.760	1.291.144.536
3155	Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	770.000.000	0.0	0.0	0.0	770.000.000	847.000.000	931.700.000	1.024.870.000
5051	Penyusunan Kebijakan Polri	336.132.000	0.0	0.0	0.0	336.132.000	369.745.200	406.719.720	447.391.692
5053	Reformasi Birokrasi Polri	1.311.589.000	0.0	0.0	0.0	1.311.589.000	1.442.747.900	1.587.022.690	1.745.724.959
5054	Manajemen Anggaran	1.342.644.000	0.0	120.000.000	0.0	1.462.644.000	1.608.908.400	1.769.799.240	1.946.779.164
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	194.000.000	0.0	0.0	0.0	194.000.000	213.400.000	234.740.000	258.214.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.540.867.492.000</b>	<b>0.0</b>	<b>54.969.900.000</b>	<b>0.0</b>	<b>2.595.837.392.000</b>	<b>2.855.421.131.200</b>	<b>3.140.963.244.320</b>	<b>3.455.059.568.752</b>

Semarang, 29 Juni 2022

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



KEPALA POLISI DAERAH JAWA TENGAH

INSPEKTUR JENDERAL POLISI



## FORMULIR 2

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2023

1. Kementerian/Lembaga

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. Sasaran Strategis

Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah

3. Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri

4. Unit Organisasi

Kepolisian Daerah Jawa Tengah

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2023	Alokasi 2023
01	Terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta layanan internal		417.017.551.000
01.01	Persentase pemanfaatan Sarpras	55,56	
Total			<b>417.017.551.000</b>

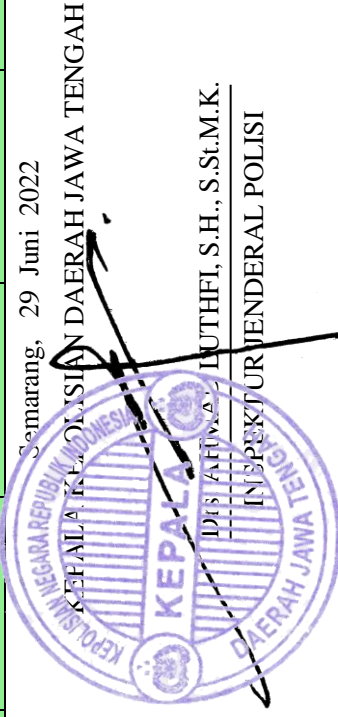
6. Output Program dan Indikator Output Program

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2023	Alokasi 2023
01	Almatsus dan Sarpras		417.017.551.000
01.01	Persentase pemenuhan Almatsus dan Sarpras		
Total			<b>417.017.551.000</b>

7. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2023			Prakiraan Kebutuhan				
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026
3084	Pengembangan Peralatan Polri	0.0	0.0	1.549.120.000	0.0	1.549.120.000	1.704.032.000	1.874.435.200	2.061.878.720
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	369.173.497.000	0.0	39.166.312.000	0.0	408.339.809.000	449.173.789.900	494.091.168.890	543.500.285.779
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	0.0	0.0	5.500.000.000	0.0	5.500.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	7.320.500.000
Jumlah		<b>369.173.497.000</b>	<b>0.0</b>	<b>46.215.432.000</b>	<b>0.0</b>	<b>415.388.929.000</b>	<b>456.927.821.900</b>	<b>502.620.604.090</b>	<b>552.882.664.499</b>

Semarang, 29 Juni 2022



## FORMULIR 2

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2023

1. **Kementerian/Lembaga** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
2. **Sasaran Strategis** : Profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah  
3. **Program** : Program Profesionalisme SDM Polri  
4. **Unit Organisasi** : Kepolisian Daerah Jawa Tengah  
5. **Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2023	Alokasi 2023
01	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional		49.780.534.000
01.01	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional	36,88	
	<b>Total</b>		<b>49.780.534.000</b>

### 6. Output Program dan Indikator Output Program

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2022	Alokasi 2022
01	SDM Polri yang kompeten		49.780.534.000
01.01	Persentase SDM Polri yang memenuhi kompetensi minimal		
	<b>Total</b>		<b>49.780.534.000</b>

### 7. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2023					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026
3096	Dukungan Manajemen Profesionalisme SDM Polri	48.035.259.000	0.0	0.0	0.0	48.035.259.000	52.838.784.900	58.122.663.390	63.934.929.729
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	89.175.000	0.0	0.0	0.0	89.175.000	98.092.500	107.901.750	118.691.925
3105	Pevelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	1.303.100.000	0.0	0.0	0.0	1.303.100.000	1.433.410.000	1.576.751.000	1.734.426.100
3108	Pembinaan Karier Personel Polri		0.0	0.0	0.0	130.000.000	143.000.000	157.300.000	173.030.000

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2023				Prakiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026
		130.000.000							
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri	223.000.000	0.0	0.0	0.0	223.000.000	245.300.000	269.830.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>49.780.534.000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>49.780.534.000</b>	<b>54.758.587.400</b>	<b>60.234.446.140</b>	<b>66.257.890.754</b>

Semarang, 29 Juni 2022

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



INSPEKTUR JENDERAL POLISI

## FORMULIR 2

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2023

- 1. Kementerian/Lembaga** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2. Sasaran Strategis** : Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Jawa Tengah
- 3. Program** : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 4. Unit Organisasi** : Kepolisian Daerah Jawa Tengah
- 5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2023	Alokasi 2023
01	Terjaganya ketertiban social dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan.		665.808.067.000
01.01	Terjaganya ketertiban social dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan.	85,77	
Total			<b>665.808.067.000</b>

### 6. Output Program dan Indikator Output Program

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2023	Alokasi 2023
01	Layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat		665.808.067.000
01.01	Indeks Harkamtibmas		
Total			<b>665.808.067.000</b>

### 7. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2023				Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025
3112	Analisis Keamanan	1.269.618.000	0.0	0.0	0.0	1.396.579.800	1.536.237.780	1.689.861.558
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	14.622.880.000	0.0	339.131.000	0.0	16.458.212.100	18.104.033.310	19.914.436.641
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	13.337.609.000	0.0	320.429.000	0.0	15.023.841.800	16.526.225.980	18.178.848.578

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2023					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	13.698.656.000	0.0	339.131.000	0.0	14.037.787.000	15.441.565.700	16.985.722.270	18.684.294.497
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	16.111.208.000	0.0	335.229.000	0.0	16.446.437.000	18.091.080.700	19.900.188.770	21.890.207.647
3120	Kerjasama Keamanan dan Ketertiban K/L	90.310.000	0.0	0.0	0.0	90.310.000	99.341.000	109.275.100	120.202.610
3128	Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	383.630.534.000	0.0	8.283.911.000	0.0	391.914.445.000	431.105.889.500	474.216.478.450	521.638.126.295
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	763.765.000	0.0	33.107.816.000	0.0	33.871.581.000	37.258.739.100	40.984.613.010	45.083.074.311
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	909.450.000	0.0	21.067.812.000	0.0	21.977.262.000	24.174.988.200	26.592.487.020	29.251.735.722
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Kesehatan Masyarakat di Bidang Lintas	350.267.000	0.0	45.726.441.000	0.0	46.076.708.000	50.684.378.800	55.752.816.680	61.328.098.348
3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	205.804.000	0.0	195.640.000	0.0	401.444.000	441.588.400	485.747.240	534.321.964
3150	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus	3.610.471.000	0.0	0.0	0.0	3.610.471.000	3.971.518.100	4.368.669.910	4.805.536.901
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	90.808.376.000	0.0	1.366.922.000	0.0	92.175.298.000	101.392.827.800	111.532.110.580	122.685.321.638
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	41.148.528.000	0.0	0.0	0.0	41.148.528.000	45.263.380.800	49.789.718.880	54.768.690.768
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	4.349.655.000	0.0	0.0	0.0	4.349.655.000	4.784.620.500	5.263.082.550	5.789.390.805
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	498.435.000	0.0	0.0	0.0	498.435.000	548.278.500	603.106.350	663.416.985
<b>Jumlah</b>		<b>585.405.566.000</b>	<b>0.0</b>	<b>105.187.901.000</b>	<b>0.0</b>	<b>696.488.028.000</b>	<b>766.136.830.800</b>	<b>842.750.513.880</b>	<b>927.025.565.268</b>

Semarang, 29 Juni 2022

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



Drs. H. M. LUTHFI, S.H., S.St.M.K.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

## FORMULIR 2

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2023

1. Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
2. Sasaran Strategis : Penegakan Hukum Secara Berkeadilan  
3. Program : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana  
4. Unit Organisasi : Kepolisian Daerah Jawa Tengah  
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2023	Alokasi 2023
01	Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi			208.890.946.000
		Persentase pengungkapan Tindak Pidana Konvensional	64,25	
		Persentase pengungkapan Tindak Pidana Transnasional	86,54	
		Persentase pengungkapan Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara	85,40	
		Persentase pengungkapan Tindak Pidana yg berimplikasi kontinjensi	50,00	
		<b>Jumlah</b>		<b>208.890.946.000</b>

### 6. Output Program dan Indikator Output Program

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2023	Alokasi 2023
01	Layanan penegakkan hukum oleh Polri			208.890.946.000
		Indeks Penegakkan Hukum Polri		
		<b>Jumlah</b>		<b>208.890.946.000</b>

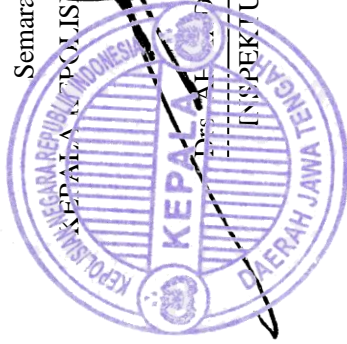
## 7. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2023					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	64.667.331.000	0.0	0.0	0.0	64.667.331.000	71.134.064.100	78.247.470.510	86.072.217.561
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	679.050.000	0.0	0.0	0.0	679.050.000	746.955.000	821.650.500	903.815.550
3141	Penyelenggaraan Laboratorium Forensik	5.157.242.000	0.0	0.0	0.0	5.157.242.000	5.672.966.200	6.240.262.820	6.864.289.102
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	88.138.515.000	0.0	0.0	0.0	88.138.515.000	96.952.366.500	106.647.603.150	117.312.363.465
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	31.817.842.000	0.0	0.0	0.0	31.817.842.000	34.999.626.200	38.499.588.820	42.349.547.702
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	1.304.956.000	0.0	0.0	0.0	1.304.956.000	1.435.451.600	1.578.996.760	1.736.896.436
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	20.554.150.000	0.0	0.0	0.0	20.554.150.000	22.609.565.000	24.870.521.500	27.357.573.650
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	1.870.611.000	0.0	0.0	0.0	1.870.611.000	2.057.672.100	2.263.439.310	2.489.783.241
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan	534.047.000	0.0	0.0	0.0	534.047.000	587.451.700	646.196.870	710.816.557
4343	Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas	0.0	0.0	3.301.625.000	0.0	3.301.625.000	3.631.787.500	3.994.966.250	4.394.462.875
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	1.329.467.000	0.0	0.0	0.0	1.329.467.000	1.462.413.700	1.608.655.070	1.769.520.577
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	541.200.000	0.0	0.0	0.0	541.200.000	595.320.000	654.852.000	720.337.200

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2023				Prakiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026
5086	Pengawasan Penyidikan	395.280.000	0.0	0.0	0.0	395.280.000	434.808.000	478.288.800	526.117.680
	<b>Jumlah</b>	<b>216.989.691.000</b>	<b>0.0</b>	<b>3.301.625.000</b>	<b>0.0</b>	<b>220.291.316.000</b>	<b>242.320.447.600</b>	<b>266.552.492.360</b>	<b>293.207.741.596</b>

Semarang, 29 Juni 2022

KEPALA POLISI DAERAH JAWA TENGAH



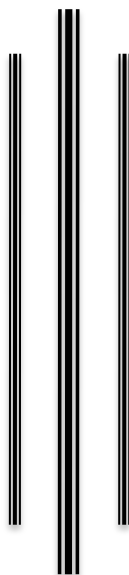
LUTHFI, S.H., S.St.M.K.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI





**RENCANA KERJA**  
**KEMENTERIAN/LEMBAGA VERSI BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**(REKAPITULASI PROGRAM)**



**SEMARANG, 29 JUNI 2022**

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**(REKAPITULASI PROGRAM)**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (060)**

Kode	Program	Usulan Pendanaan Tahun 2023					Perkiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026	
01	Program Dukungan Manajemen	2.540.867.492.000	0.0	54.969.900.000	0.0	2.595.837.392.000	2.855.421.131.200	3.140.963.244.320	3.455.059.568.752	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	369.173.497.000	0.0	46.215.432.000	0.0	415.388.929.000	456.927.821.900	502.620.604.090	552.882.664.499	
03	Program Profesionalisme SDM Polri	49.780.534.000	0.0	0.0	0.0	49.780.534.000	54.758.587.400	60.234.446.140	66.257.890.754	
04	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	585.405.566.000	0.0	105.187.901.000	0.0	690.593.467.000	766.136.830.800	842.750.513.880	927.025.565.268	
05	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	216.889.691.000	0.0	3.301.625.000	0.0	220.191.316.000	242.320.447.600	266.552.492.360	293.207.741.596	
	<b>Jumlah</b>	<b>3.762.410.780.000</b>	<b>0.0</b>	<b>215.375.419.000</b>	<b>0.0</b>	<b>3.977.786.199.000</b>	<b>4.375.564.818.900</b>	<b>4.813.121.300.790</b>	<b>5.294.433.430.869</b>	

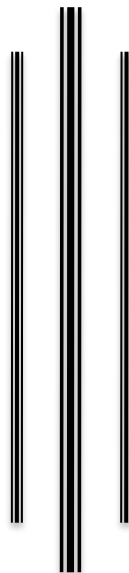
Semarang, 29 Juni 2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH





**RENCANA KERJA**  
**KEMENTERIAN/LEMBAGA VERSI BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**(RINCIAN KEGIATAN PERPROGRAM)**



**SEMARANG, 29 JUNI 2022**

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**(RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM)**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (060)**

Kode	Program/Kegiatan	Usulan Pendanaan Tahun 2023					Perkiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026
01	Program Dukungan Manajemen	2.540.867.492.000	0.0	54.969.900.000	0.0	2.595.837.392.000	2.855.421.131.200	3.140.963.244.320	3.455.059.568.752
01.3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	758.527.000	0.0	120.000.000	0.0	878.527.000	966.379.700	1.063.017.670	1.169.319.437
01.3070	Penerangan Masyarakat	5.847.185.000	0.0	0.0	0.0	5.847.185.000	6.431.903.500	7.075.093.850	7.782.603.235
01.3071	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	161.815.000	0.0	0.0	0.0	161.815.000	177.996.500	195.796.150	215.375.765
01.3072	Pelayanan Kesehatan Polri	26.963.759.000	0.0	54.415.900.000	0.0	81.379.659.000	89.517.624.900	98.469.387.390	108.316.326.129
01.3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	2.494.661.372.000	0.0	120.000.000	0.0	2.494.781.372.000	2.744.259.509.200	3.018.685.460.120	3.320.554.006.132
01.3088	Pertanggungjawaban Profesi	480.551.000	0.0	0.0	0.0	480.551.000	528.606.100	581.466.710	639.603.381
01.3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	1.438.180.000	0.0	0.0	0.0	1.438.180.000	1.581.998.000	1.740.197.800	1.914.217.580
01.3090	Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri	1.877.024.000	0.0	0.0	0.0	1.877.024.000	2.064.726.400	2.271.199.040	2.498.318.944
01.3091	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	3.923.169.000	0.0	0.0	0.0	3.923.169.000	4.315.485.900	4.747.034.450	5.221.737.939
01.3149	Pengelolaan Multimedia	25.489.000	0.0	0.0	0.0	25.489.000	28.037.900	30.841.690	33.925.859
01.3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	970.056.000	0.0	0.0	0.0	970.056.000	1.067.061.600	1.173.767.760	1.291.144.536
01.3155	Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	770.000.000	0.0	0.0	0.0	770.000.000	847.000.000	931.700.000	1.024.870.000

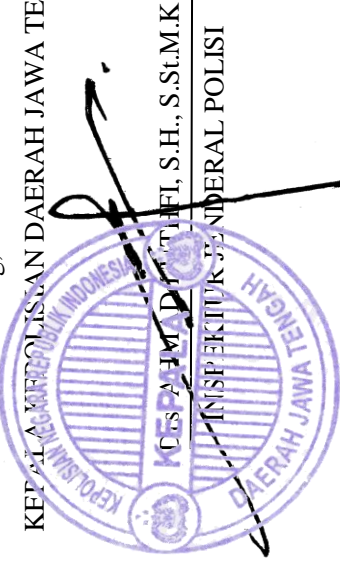
Kode	Program/Kegiatan	Usulan Pendanaan Tahun 2023						Perkiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026	
01.5051	Penyusunan Kebijakan Polri	336.132.000	0.0	0.0	0.0	336.132.000	369.745.200	406.719.720	447.391.692	
01.5053	Reformasi Birokrasi Polri	1.311.589.000	0.0	0.0	0.0	1.311.589.000	1.442.747.900	1.587.022.650	1.745.724.959	
01.5054	Manajemen Anggaran	1.342.644.000	0.0	120.000.000	0.0	1.462.644.000	1.608.908.400	1.769.799.240	1.946.779.164	
01.5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	194.000.000	0.0	0.0	0.0	194.000.000	213.400.000	234.740.000	258.214.000	
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri</b>	<b>369.173.497.000</b>	<b>0.0</b>	<b>46.215.432.000</b>	<b>0.0</b>	<b>415.388.929.000</b>	<b>456.927.821.900</b>	<b>502.620.604.090</b>	<b>552.882.664.499</b>	
02.3084	Pengembangan Peralatan Polri	0.0	0.0	1.549.120.000	0.0	1.549.120.000	1.704.032.000	1.874.435.200	2.061.878.720	
02.5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	369.173.497.000	0.0	39.166.312.000	0.0	408.339.809.000	449.173.789.900	494.091.168.890	543.500.285.779	
02.5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	0.0	0.0	5.500.000.000	0.0	5.500.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	7.320.500.000	
<b>03</b>	<b>Program Profesionalisme SDM Polri</b>	<b>49.780.534.000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>49.780.534.000</b>	<b>54.758.587.400</b>	<b>60.234.446.140</b>	<b>66.257.890.754</b>	
03.3096	Dukungan Manajemen Profesionalisme SDM Polri	48.035.259.000	0.0	0.0	0.0	48.035.259.000	52.838.784.900	58.122.663.390	63.934.929.729	
03.3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	89.175.000	0.0	0.0	0.0	89.175.000	98.092.500	107.901.750	118.691.925	
03.3105	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	1.303.100.000	0.0	0.0	0.0	1.303.100.000	1.433.410.000	1.576.751.000	1.734.426.100	
03.3108	Pembinaan Karier Personel Polri	130.000.000	0.0	0.0	0.0	130.000.000	143.000.000	157.300.000	173.030.000	
03.3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri	223.000.000	0.0	0.0	0.0	223.000.000	245.300.000	269.830.000	296.813.000	
<b>04</b>	<b>Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>585.405.566.000</b>	<b>0.0</b>	<b>105.187.901.000</b>	<b>0.0</b>	<b>690.488.028.000</b>	<b>766.136.830.800</b>	<b>842.750.513.880</b>	<b>927.025.565.268</b>	
04.312	Analisis Keamanan	1.269.618.000	0.0	0.0	0.0	1.269.618.000	1.396.579.800	1.536.237.780	1.689.861.558	
04.314	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	14.622.880.000	0.0	339.131.000	0.0	14.962.011.000	16.458.212.100	18.104.033.310	19.914.436.641	
04.315	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	13.337.609.000	0.0	320.429.000	0.0	13.658.038.000	15.023.841.800	16.526.225.980	18.178.848.578	

Kode	Program/Kegiatan	Usulan Pendanaan Tahun 2023						Perkiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026	
04.316	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	13.698.656.000	0.0	339.131.000	0.0	14.037.787.000	15.441.565.700	16.985.722.270	18.684.294.497	
04.317	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	16.111.208.000	0.0	335.229.000	0.0	16.446.437.000	18.091.080.700	19.900.188.770	21.890.207.647	
04.3120	Kerjasama Keamanan dan Ketertiban K/L	90.310.000	0.0	0.0	0.0	90.310.000	99.341.000	109.275.100	120.202.610	
04.3128	Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	393.630.534.000	0.0	8.283.911.000	0.0	391.914.445.000	431.105.889.500	474.216.478.450	521.638.126.295	
04.3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	763.765.000	0.0	33.107.816.000	0.0	33.871.581.000	37.258.739.100	40.984.613.010	45.083.074.311	
04.3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	909.450.000	0.0	21.067.812.000	0.0	21.977.262.000	24.174.988.200	26.592.487.020	29.251.735.722	
04.3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Kesehatan Masyarakat di Bidang Lintas	350.267.000	0.0	45.726.441.000	0.0	46.076.708.000	50.684.378.800	55.752.816.660	61.328.098.348	
04.3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	205.804.000	0.0	195.640.000	0.0	401.444.000	441.588.400	485.747.240	534.321.964	
04.3150	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus	3.610.471.000	0.0	0.0	0.0	3.610.471.000	3.971.518.100	4.368.669.910	4.805.536.911	
04.5076	Pembinaan Potensi Keamanan	90.808.376.000	0.0	1.366.922.000	0.0	92.175.298.000	101.392.827.800	111.532.110.560	122.685.321.638	
04.5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	41.148.528.000	0.0	0.0	0.0	41.148.528.000	45.263.380.800	49.789.718.880	54.768.690.768	
04.5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	4.349.655.000	0.0	0.0	0.0	4.349.655.000	4.784.620.500	5.263.082.550	5.789.390.805	
04.5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	498.435.000	0.0	0.0	0.0	498.435.000	548.278.500	603.106.350	663.416.985	
05	<b>Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana</b>	<b>216.989.691.000</b>	<b>0.0</b>	<b>3.301.625.000</b>	<b>0.0</b>	<b>220.291.316.000</b>	<b>242.320.447.600</b>	<b>266.552.492.360</b>	<b>293.207.741.596</b>	
05.3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	64.667.331.000	0.0	0.0	0.0	64.667.331.000	71.134.064.100	78.247.470.510	86.072.217.561	
05.3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	679.050.000	0.0	0.0	0.0	679.050.000	746.955.000	821.650.500	903.816.550	
05.3141	Penyelenggaraan Laboratorium Forensik	5.157.242.000	0.0	0.0	0.0	5.157.242.000	5.672.966.200	6.240.262.820	6.864.289.102	
05.3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	88.138.515.000	0.0	0.0	0.0	88.138.515.000	96.952.366.500	106.647.603.150	117.312.363.465	

Kode	Program/Kegiatan	Usulan Pendanaan Tahun 2023						Perkiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2024	2025	2026	
05.3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	31.817.842.000	0.0	0.0	0.0	31.817.842.000	34.999.626.200	38.499.588.820	42.349.547.702	
05.3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	1.304.956.000	0.0	0.0	0.0	1.304.956.000	1.435.451.600	1.578.996.760	1.736.896.436	
05.3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	20.554.150.000	0.0	0.0	0.0	20.554.150.000	22.609.565.000	24.870.521.500	27.357.573.650	
05.3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	1.870.611.000	0.0	0.0	0.0	1.870.611.000	2.067.672.100	2.263.439.310	2.489.783.241	
05.4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan	534.047.000	0.0	0.0	0.0	534.047.000	587.451.700	646.196.870	710.816.557	
05.4343	Penindakan Tindak Pidana Laka Lintas	0.0	0.0	3.301.625.000	0.0	3.301.625.000	3.631.787.500	3.994.966.250	4.394.462.875	
05.5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	1.329.467.000	0.0	0.0	0.0	1.329.467.000	1.462.413.700	1.608.655.070	1.769.520.577	
05.5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	541.200.000	0.0	0.0	0.0	541.200.000	595.320.000	654.852.000	720.337.200	
05.5086	Pengawasan Penyelidikan	395.280.000	0.0	0.0	0.0	395.280.000	434.808.000	478.288.800	526.117.680	
	<b>Jumlah</b>	<b>3.762.410.780.000</b>	<b>0.0</b>	<b>215.375.419.000</b>	<b>0.0</b>	<b>3.977.786.199.000</b>	<b>4.375.564.818.900</b>	<b>4.813.121.300.790</b>	<b>5.294.433.430.869</b>	

Semarang, 29 Juni 2022

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



Desy M. D. THFI, S.H., S.St.M.K.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI